

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi September II Tahun 2025 No. 65

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



*Kritik Regulasi Desa  
di Kawasan Hutan*

*Jangan Sampai  
Rakyat Jadi  
Korban*





PKS

# Pimpinan FRAKSI PKS DPR RI

Kreatif, Atraktif, Substantif



KETUA FRAKSI

**Dr. H. ABDUL  
KHARIS  
ALMASYHARI**  
S.S., M.Si., A.M.

WAKIL  
SEKRETARIS

**IZZUDDIN  
ALQASSAM  
KASUBA**

SEKRETARIS

**Hj. LEDIA  
HANIFA  
AMALIAH**  
S.Si., M.P.Si.

WAKIL  
AHARA

**ISMAIL  
BACHTIAR**

BENDAHARA

**Dr. Hj. KURNIASIH  
MUFIDAYATI** M.Si.

WAKABID POLNIRAM

**Dr. H. SUKAMTA**

WAKABID KESRA

**Dr. Hj. NETTY  
PRASETIYANI** M.Si.

WAKABID KINEFA

**Drs. H. ADANG  
DARADJATUN**

WAKABID EKKU

**AMIN AK** M.M.

WAKABID INBANG

**ABDUL HADI**  
S.Si., M.M.



# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



image istimewa

## Singgung Aksi Scammer dan Hoax, Waka Komisi I DPR Nilai Wacana 'Satu Warga, Satu Akun' Bisa Cegah Kriminalitas

Jakarta (17/09) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk aksi penipuan digital (scamming), serta menjamurnya akun anonim di media sosial yang digunakan untuk menyebarkan hoax dan memanipulasi opini publik.

Ia menilai kedua persoalan ini saling berkaitan dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Menurut Sukamta, pengaturan anonimitas di dunia digital sangat penting agar identitas pengguna dapat terlihat jelas di media sosial. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan identitas anonim untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diminimalisir.

"Prinsipnya kita ingin mengurangi anonimitas di dunia digital, agar nama dan identitas pengguna dapat terlihat dengan jelas di media sosial maupun platform lainnya. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anonim untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain," kata Sukamta, Rabu (17/9/2025).

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji wacana pembatasan satu orang satu akun media sosial. Kajian ini juga mencakup aturan agar setiap akun media sosial terkait

dengan satu nomor ponsel, termasuk pembatasan jumlah nomor yang dapat digunakan oleh satu orang.

Menanggapi hal tersebut, Sukamta juga menyinggung rencana pembatasan nomor telepon melalui verifikasi faktual dengan menggunakan identitas asli saat pendaftaran, khususnya bagi perangkat modern yang jumlahnya sudah cukup besar.

Sukamta menilai kebijakan ini dapat dilaksanakan, asalkan tetap mempertimbangkan keberagaman kondisi masyarakat di lapangan.

"Dulu, ada pikiran dari pemerintah untuk membuat setiap pendaftaran itu dengan identitas asli dengan verifikasi faktual. Saya kira untuk handphone yang modern, yang baru dan itu jumlahnya cukup besar. Itu bisa dilakukan," tuturnya.

Namun, Sukamta juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat yang masih

## Singgung Aksi Scammer dan Hoax, Waka Komisi I DPR Nilai Wacana 'Satu Warga, Satu Akun' Bisa Cegah Kriminalitas

### « SEBELUMNYA

mengalami kesulitan. Misalnya dalam membeli perangkat baru yang diperlukan untuk proses verifikasi itu.

"Tapi bagi sebagian masyarakat yang mungkin masih kesulitan untuk beli handphone baru, itu yang harus ada solusinya, jangan dipaksakan," sebut Sukamta.

Sementara terkait wacana pembatasan media sosial dengan sistem 'satu warga, satu akun', Sukamta melihat hal ini sebagai salah satu cara menekan anonimitas yang sering menjadi celah bagi praktik ujaran

kebencian dan tindakan kriminal di dunia maya.

"Prinsipnya itu kita ingin ada ketidakadaan anonim. Jadi supaya ada nama dan identitas yang terang di dunia digital, medsos atau yang lain-lain," ucapnya.

"Supaya tidak ada orang yang punya motif kriminal atau sesuatu yang dilarang di undang-undang yang bersembunyi di balik anonimisme. Itu kan intinya," lanjut Sukamta.

Pimpinan Komisi DPR yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika ini pun berpandangan, sistem satu orang satu akun dapat menekan

angka anonimitas yang negatif. Meski begitu, kata Sukamta, wacana kebijakan itu perlu dibahas lebih lanjut.

"Apakah itu dengan cara satu akun satu orang, atau dengan cara yang lain yang penting adalah supaya orang diharuskan untuk pakai identitas asli. Nah kalau itu yang ditempuh, itu salah satu cara yang sangat bagus," jelas Legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Di sisi lain, Sukamta menilai permasalahan utama di dunia digital tidak hanya berkaitan dengan banyaknya akun atau identitas anonim, tetapi juga terkait dengan penegakan hukum serta peningkatan literasi digital yang perlu diperkuat.

"Saat ini yang diperlukan bukan hanya pembentukan aturan baru, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks," urai Sukamta.

Sukamta pun mendorong Pemerintah melalui kementerian terkait agar menghadirkan solusi yang menyeluruh dan inklusif.

"Ruang digital Indonesia harus menjadi tempat yang sehat, aman, dan adil bukan sekadar bebas dari anonim, tapi juga bebas dari ketakutan, manipulasi, dan diskriminasi kebijakan," tutupnya.



"Prinsipnya kita ingin mengurangi anonimitas di dunia digital, agar nama dan identitas pengguna dapat terlihat dengan jelas di media sosial maupun platform lainnya. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anonim untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain,"

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa



image istimewa

## DPP PKS Kecam Agresi Militer Israel di Lima Negara Dalam 48 Jam Terakhir, Desak Pemerintah RI Ambil Sikap Tegas di Forum Internasional

Jakarta, 10 September 2025 – Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. mengemukakan keras rangkaian serangan militer Israel dalam dua hari terakhir yang menargetkan empat wilayah sekaligus: Qatar, Suriah, Lebanon, Tunisia dan Gaza.

Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan eskalasi konflik yang sangat berbahaya dan dapat memicu ketegangan regional yang lebih luas di Timur Tengah.

“Serangan Israel ke Qatar dan negara-negara lain bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. PKS memandang ini sebagai agresi militer yang harus dihentikan segera,” tegas Syahrul Aidi.

Serangan paling mengesankan terjadi pada Selasa (9/9) ketika Israel meluncurkan serangan udara di Doha, Qatar, menargetkan para pemimpin Hamas yang tengah membahas gencatan senjata. Sedikitnya enam orang tewas dan sejumlah warga sipil terluka. Qatar mengemukakan sikap sebagai agresi brutal dan pelanggaran kedaulatan negara. Tak hanya Qatar,

serangan Israel juga meluas ke Suriah, Lebanon, dan Gaza.

Israel menyerang beberapa lokasi militer strategis di Latakia, Homs, dan Palmyra Suriah menghantam instalasi pertahanan udara dan infrastruktur militer. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan yang diduga membawa anggota Hezbollah di dekat Jiyeh, selatan Beirut, Lebanon melukai sejumlah orang. Israel menyerang dengan drone kapal Global Sumud Flotilla di perairan Tunisia. Israel juga meningkatkan serangan udara dan darat di kota Gaza, menginstruksikan ribuan warga sipil untuk mengungsi dari distrik Rimal menuju zona kemanusiaan.

DPP PKS mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan Tindakan nyata terhadap Israel.

“Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap keras serangan Israel terhadap Qatar,

## DPP PKS Kecam Agresi Militer Israel di Lima Negara Dalam 48 Jam Terakhir, Desak Pemerintah RI Ambil Sikap Tegas di Forum Internasional

### « SEBELUMNYA

Suriah, Lebanon, dan Gaza melalui forum PBB dan OKI. meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi kedaulatan negara-negara yang diserang. Seluruh elemen bangsa Indone-

sia harus melakukan tindakan lebih aktif menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara ASEAN, OKI, parlemen dunia dan Gerakan Non-Blok untuk menekan Israel serta memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan masyarakat sipil yang terdampak di Qatar, Suriah, dan

Lebanon.”

“Indonesia tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran kedaulatan dan kemanusiaan ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia harus berdiri di garda terdepan membela keadilan dan perdamaian,” tambah lulusan Al Azhar Mesir ini.

PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendukung diplomasi internasional, membela hak-hak rakyat Palestina, serta mendorong penghentian agresi militer Israel di kawasan Timur Tengah.



“Indonesia tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran kedaulatan dan kemanusiaan ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia harus berdiri di garda terdepan membela keadilan dan perdamaian,”

**Dr. H. SYAHRUL AIDI  
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Badan Diplomasi dan  
Pembiayaan Luar Negeri DPP PKS,



image istimewa

## Aus Hidayat Nur Dorong Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintahan Daerah

Palembang (17/09) --- Anggota Komisi II DPR RI mendorong percepatan sistem digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah karena hal tersebut menjadi solusi untuk kendala dan permasalahan umum pelayanan publik.

Hal tersebut ia sampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 17 September 2025 di Palembang.

"Kendala dan permasalahan umum pelayanan publik di Sumatera Selatan sama dengan wilayah provinsi di Indonesia",

"Proses pelayanan publik yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, tingkat korupsi yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,"

### **KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi II DPR RI

ungkap Aus. Ia menjabarkan bahwa kendala tersebut mencakup beberapa aspek antara lain birokrasi yang kompleks, korupsi, kurangnya aksesibilitas, keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat.

"Proses pelayanan publik yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, tingkat korupsi yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ucap Aus.

Terkait kurangnya aksesibilitas, masyarakat di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik yang memadai. Sedangkan dari sisi SDM, jumlah dan kualitas tenaga pustakawan yang terbatas dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik, seperti di Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak layanan yang baik dan peran lembaga seperti Ombudsman dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

"Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi dapat diterapkan," kata anggota Fraksi PKS tersebut.

"Pertama, Menerapkan prinsip good governance. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua Pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi mobile dan website pemerintah dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan ketiga, reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik," terang Aus.

# Fraksi PKS: Kebijakan Kenaikan PNPB Pertanahan Harus Berkeadilan dan Tidak Membebani Rakyat Kecil

Jakarta (16/09) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menyampaikan sikap terhadap rencana kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pertanahan yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pertanahan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam rapat tersebut, Jazuli Juwaini mengapresiasi semangat pemerintah untuk meningkatkan PNPB demi memperkuat APBN, tetapi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menjadi beban bagi rakyat kecil, terutama masyarakat miskin yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Target kenaikan PNPB penting untuk menopang APBN, tetapi jangan sampai objeknya justru menjerat rakyat kecil. Kita tidak boleh membebani mereka dengan tarif yang memberatkan. Kebijakan ini harus tepat

asaran, dengan klasifikasi yang adil sesuai nilai tanah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” tegas Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli meminta agar klasifikasi tarif PNPB tidak hanya berbasis luas tanah, tetapi juga mempertimbangkan klusterisasi wilayah dan nilai tanah (NJOP). Ia mencontohkan perbedaan nilai tanah di Menteng, Pondok Indah, Ciganjur, Ciputat, hingga Bojonggede yang tidak bisa disamaratakan.

Selain itu, Jazuli juga mengusulkan penerapan mekanisme perlindungan bagi

rakyat miskin, serupa dengan skema subsidi listrik 900 kWh yang digratiskan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

“PNBP harus didesain dengan pendekatan keberpihakan. Kelompok pemilik modal besar, HGU-HGU besar, dan tanah-tanah dengan nilai tinggi yang seharusnya menjadi objek kenaikan PNPB, bukan rakyat kecil yang sudah kesulitan membeli dan mengurus tanah,” tambahnya.

Jazuli juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan sebagai prasyarat kenaikan tarif. Ia mencontohkan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan yang mampu menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah kurang dari satu bulan, dan meminta agar kecepatan dan kualitas pelayanan ini menjadi standar nasional.

Terakhir, Jazuli mengingatkan bahwa beban biaya yang memberatkan masyarakat justru sering terjadi di level desa dan kecamatan ketika pengurusan administrasi tanah membu-



“PNBP harus didesain dengan pendekatan keberpihakan. Kelompok pemilik modal besar, HGU-HGU besar, dan tanah-tanah dengan nilai tinggi yang seharusnya menjadi objek kenaikan PNPB, bukan rakyat kecil yang sudah kesulitan membeli dan mengurus tanah,”

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banteng II

tuhkan tanda tangan kepala desa dan camat. Ia mendorong BPN dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi agar praktik pungutan liar dapat ditekan.

“Kebijakan ini harus berkeadilan. Jangan sampai kenaikan PNPB menciptakan beban baru bagi masyarakat. Fraksi

PKS mendukung optimalisasi PNPB dengan catatan: tarif harus adil, pelayanan dipercepat, dan rakyat kecil diberikan perlindungan. Inilah wujud kehadiran negara dalam memudahkan, bukan mempersulit, rakyatnya,” pungkash Jazuli.



# Aher Apresiasi Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan Sawah: Langkah Strategis Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang secara resmi memberlakukan moratorium atau penghentian sementara izin alih fungsi lahan sawah.

Kebijakan ini adalah langkah strategis dalam melindungi lahan pertanian produktif dari ancaman konversi menjadi kawasan non-pertanian, seperti perumahan, kawasan komersial, maupun industri.

"Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah. Kebijakan ini adalah langkah penting demi menjaga ketersediaan lahan pertanian, khususnya untuk komoditas padi yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia." Ungkap Kang Aher di kompleks parlemen, senayan DPR RI. Lebih jauh, mantan

Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menekankan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali selama ini telah menjadi salah satu penyebab berkurangnya area tanam padi di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan pada impor beras. Dalam hal ini, Komisi II DPR RI siap memberikan dukungan dalam penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini.

"Moratorium saja tidak cukup, harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, pemetaan lahan, dan

perlindungan terhadap petani agar kebijakan ini benar-benar efektif dan efisien dalam mendukung program ketahanan pangan." Tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mendorong agar pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dalam menjaga kesinambungan lahan sawah produktif. Pemanfaatan teknologi pertanian, penyediaan sarana produksi, dan insentif bagi petani dinilai sebagai langkah tambahan yang penting untuk menguatkan sektor pertanian nasional.

"Moratorium alih fungsi lahan ini bukan sekadar menghentikan izin, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen nasional dalam melindungi lahan pangan. Dengan demikian, kita bisa memastikan ketahanan pangan jangka panjang sekaligus kesejahteraan petani." Demikian tutup Kang Aher.



"Moratorium alih fungsi lahan ini bukan sekadar menghentikan izin, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen nasional dalam melindungi lahan pangan. Dengan demikian, kita bisa memastikan ketahanan pangan jangka panjang sekaligus kesejahteraan petani."

**Dr. H. AHMAD  
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Anggota Komisi II DPR RI

# Adang Daradjatun Tekankan Pertanggungjawaban Komando dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung

Jakarta (10/9) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya kejelasan pandangan terkait pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat

saat mengikuti fit and proper test calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Dalam kesempatan tersebut, Adang menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh sejumlah pihak kepada calon Hakim Agung harus menjadi pegangan moral dan integritas dalam menjalankan tugas.

“Bapak diberikan rekomendasi oleh 11 orang, dan semuanya menyatakan Bapak seorang yang baik, profesional, dan sebagainya. Jadi titipan saya, andai kata nanti terpilih, tolong rekomendasikan itu menjadi pegangan,” ujar Adang.

Lebih lanjut, Adang mengkritisi salah satu bagian makalah yang disampaikan calon Ha-

kim Agung mengenai kewenangan pengadilan HAM. Ia meminta penjelasan lebih dalam mengenai pandangan calon terkait konstruksi pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

“Saya mempelajari makalah yang Bapak sampaikan, ada yang agak sedikit nyangkut di saya. Di halaman kedua, Bapak menulis bahwa pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat sekian kejahatan perang. Namun demikian, atas prinsip kekerasan dan jatuhnya korban akibat pelanggaran HAM akan diupayakan ditarik dalam konstruksi dua jenis pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan keja-

hatan terhadap kemanusiaan. Saya mau penjelasan yang lebih mendalam, Bapak ini mau narik kemana sebetulnya apabila terjadi di negara kita?” ungkapnya.

Selain itu, Adang juga menyoroti aspek pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran hukum humaniter. Menurutnya, seorang komandan memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan anggota pelaksana yang hanya menjalankan perintah.

“Sebagai kesimpulan, Bapak menyatakan bahwa konstelasi yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hukum humaniter tidak hanya pada pelaku, namun juga pada atasan komando. Bapak harus bisa meyakinkan kita, sampai di mana hubungan dan pertanggungjawaban itu. Saya akan berpikir, kalau misalnya anggota melakukan perintah dari atasan, maka yang bertanggung jawab adalah komandannya, bukan anggotanya. Silakan Bapak bercerita sehingga kita bisa menangkap apa yang ada di pemikiran Bapak,” tegas Adang.



Bapak menyatakan bahwa konstelasi yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hukum humaniter tidak hanya pada pelaku, namun juga pada atasan komando. Bapak harus bisa meyakinkan kita, sampai di mana hubungan dan pertanggungjawaban itu. Saya akan berpikir, kalau misalnya anggota melakukan perintah dari atasan, maka yang bertanggung jawab adalah komandannya, bukan anggotanya.

**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI

Rapat uji kelayakan ini merupakan bagian dari proses seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI yang akan memberikan penilaian atas

integritas, pemahaman hukum, serta visi dan misi para kandidat dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.



image istimewa

## Sampaikan Pandangan Pada Pemilihan Hakim Agung dan Ad Hoc, Fraksi PKS Tegaskan Pentingnya Menjaga Marwah Peradilan

Jakarta, (16/9) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menegaskan komitmen fraksinya untuk memastikan proses pemilihan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) RI menghasilkan sosok-sosok yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang terpuji.

Dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI yang digelar hari ini, Nasir Djamil menyampaikan bahwa Fraksi PKS memandang Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar utama tegaknya kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan semakin menumpuknya perkara yang harus diselesaikan, MA memerlukan figur hakim yang tidak hanya mumpuni secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki keberanian moral untuk menegakkan hukum secara adil.

"PKS konsisten mendorong agar proses seleksi ini menghasilkan hakim agung dan hakim ad hoc yang bersih dari konflik kepentingan, memiliki integritas, serta mampu menjadi wajah hukum yang memberikan harapan kepada pencari keadilan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas putusan di tingkat kasasi dan sekaligus menjaga marwah peradilan," tegas Nasir Djamil.

Fraksi PKS menghormati seluruh tahapan seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan menilai bahwa hasil seleksi ini telah melalui mekanisme yang ketat, transparan, dan akuntabel. Dengan mempertimbangkan kebutuhan Mahkamah Agung dan hasil uji kelayakan, Fraksi PKS menyetujui dan mendukung nama-nama berikut untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc:

1. Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. – Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, ditetapkan sebagai Hakim Ad Hoc HAM
2. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
3. Dr. Diana Malemita Ginting –

## Sampaikan Pandangan Pada Pemilihan Hakim Agung dan Ad Hoc, Fraksi PKS Tegaskan Pentingnya Menjaga Marwah Peradilan

### « SEBELUMNYA

Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.

4. Dr. Budi Nugroho, S.H., M.A., Hum. – Hakim Pengendalian Pajak, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.

5. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar TUN.

6. Dr. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Agama.

7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Agama.

8. Dr. Heru Pramono, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.

10. Suradi, S.H., S.O., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, ditetapkan sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.

“Persetujuan Fraksi PKS terhadap nama-nama ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mengingatkan bahwa hakim yang terpilih harus menjaga independensi dan profesionalisme agar Mahkamah Agung tetap menjadi benteng terakhir pencari keadilan,” pungkas Nasir Djamil.



“PKS konsisten mendorong agar proses seleksi ini menghasilkan hakim agung dan hakim ad hoc yang bersih dari konflik kepentingan, memiliki integritas, serta mampu menjadi wajah hukum yang memberikan harapan kepada pencari keadilan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas putusan di tingkat kasasi dan sekaligus menjaga marwah peradilan,”

**Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**  
Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

## 80% Pasokan Gambir Dunia dari Sumbar, Rahmat Saleh Dorong Hilirisasi

Padang (16/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan pentingnya hilirisasi gambir di Sumatera Barat.

Menurutnya, provinsi ini menyumbang sekitar 80 persen ekspor gambir dunia, tetapi sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah.

“Alhamdulillah, kunjungan Menteri Pertanian ke Sumatera Barat memberi peluang bagi pelaksanaan program strategis. Salah satunya adalah hilirisasi gambir melalui pembangunan pabrik pengolahan, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,”

### H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Komisi IV DPR RI

“Alhamdulillah, kunjungan Menteri Pertanian ke Sumatera Barat memberi peluang bagi pelaksanaan program strategis. Salah satunya adalah hilirisasi gambir melalui pembangunan pabrik pengolahan, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,” kata Rahmat usai mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopinda Sumbar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Selasa (16/9/2025).

Dia menambahkan, hilirisasi akan memberikan dampak langsung pada petani karena produk yang dijual memiliki nilai tambah.

Rahmat menilai langkah itu perlu didukung dengan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

“Kalau ada pabrik pengolahan, petani bisa memperoleh harga yang lebih baik. Ini tentu akan membantu peningkatan

kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rahmat juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait agar rencana tersebut dapat terealisasi.

Dia menekankan, peluang yang ada perlu segera ditindaklanjuti.

Selain itu, ia menyebut pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola industri pengolahan gambir.

“Perlu melibatkan generasi muda agar ada tenaga terampil yang siap mengembangkan produk turunan gambir,” jelasnya.

Rahmat menegaskan hilirisasi gambir dapat menjadi langkah strategis bagi Sumatera Barat dalam meningkatkan posisi di pasar global.

“Sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” pungkasnya.

# Ingatkan Pemerintah, Slamet Tekankan Koordinasi Lemah Bisa Hancurkan Kemandirian Pertanian

Jakarta (16/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan penting dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan jajaran.

Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran dan koordinasi kebijakan lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Slamet menyatakan dukungannya atas penambahan anggaran di sektor pertanian. Namun ia menegaskan bahwa DPR RI juga memiliki tugas konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar program-program yang dicanangkan Presiden dapat berjalan dengan baik.

Ia menyoroti beberapa isu strategis yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertama, ia mempertanyakan status lahan seluas 140,5

hektare yang tercantum dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Apakah 140,5 hektare tersebut merupakan bagian terpisah dari 250 ribu hektare yang ada dalam perencanaan Kementerian Pertanian? Mohon dijelaskan," ujar Slamet.

Selain itu, ia menyinggung kasus kebocoran pipa PT Vale yang dinilainya perlu diantisipasi dampaknya terhadap kesuburan tanah dan lingkungan pertanian. Meskipun Menteri Pertanian telah memberikan jaminan tidak akan mengganggu swasembada pangan dalam jangka pendek, drh. Slamet menekankan perlunya langkah antisipasi jangka panjang agar sektor

pertanian tetap terlindungi. Ia juga mempertanyakan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pembebasan biaya impor etanol.

"Apakah Kementerian Pertanian dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut? Mengapa kebijakan ini muncul ketika petani tebu kita sedang menghadapi tekanan dan stok etanol dalam negeri juga mencukupi?" ungkapnya.

Menurut Slamet, kebijakan yang kurang terkoordinasi berpotensi merugikan petani dalam negeri dan melemahkan kemandirian sektor pertanian. Karena itu ia meminta Kementerian Pertanian untuk memperkuat komunikasi lintas kementerian dan menyampaikan sikap resmi terkait kebijakan impor etanol yang berdampak pada petani tebu.



Kebijakan yang kurang terkoordinasi berpotensi merugikan petani dalam negeri dan melemahkan kemandirian sektor pertanian. Karena itu ia meminta Kementerian Pertanian untuk memperkuat komunikasi lintas kementerian dan menyampaikan sikap resmi terkait kebijakan impor etanol yang berdampak pada petani tebu.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

## Fraksi PKS Dukung Anggaran Rp1,7 Triliun untuk Percepat Modernisasi Sistem Karantina Nasional

Jakarta (15/09) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil NTB I, Johan Rosihan,

menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran Badan Karantina Indonesia sebesar lebih dari Rp1,7 triliun dalam Rapat Kerja Komisi IV

“Fraksi PKS menyetujui anggaran sebesar Rp1,7 triliun lebih untuk Badan Karantina Indonesia dengan catatan agar penggunaannya benar-benar fokus pada modernisasi sistem karantina. Kami ingin memastikan anggaran ini membawa dampak nyata, bukan hanya administrasi, tetapi langsung dirasakan masyarakat, petani, dan pelaku ekspor-impor,”

### **H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

DPR RI bersama Badan Karantina Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Johan menegaskan dukungan ini diberikan dengan harapan agar anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk mempercepat modernisasi sistem karantina nasional. Menurutnya, penguatan karantina memiliki dampak strategis bagi efisiensi logistik, kelancaran ekspor-impor, perlindungan sumber daya hayati, hingga ketahanan pangan nasional.

“Fraksi PKS menyetujui anggaran sebesar Rp1,7 triliun lebih untuk Badan Karantina Indonesia dengan catatan agar penggunaannya benar-benar

fokus pada modernisasi sistem karantina. Kami ingin memastikan anggaran ini membawa dampak nyata, bukan hanya administrasi, tetapi langsung dirasakan masyarakat, petani, dan pelaku ekspor-impor,” ungkap Johan.

Ia menilai bahwa modernisasi karantina akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pertanian nasional. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya menyangkut teknis karantina, tetapi juga strategi besar dalam mewujudkan pertanian nasional yang berkelanjutan.

## Saadiah Uluputty Kritik Regulasi Desa di Kawasan Hutan: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa regulasi tumpang tindih terkait desa-desa di kawasan hutan telah membuat masyarakat adat dan desa tertinggal menjadi korban kebijakan.

la menyebut kondisi ini menimbulkan kemiskinan struktural dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat bersama Menteri Desa dan Menteri Daerah Tertinggal, Saadiah mengungkapkan perbedaan data antar kementerian. Kementerian Kehutanan mencatat 25.863 desa berada dalam kawasan hutan dengan 9,2 juta rumah tangga terdampak. Namun, data Kementerian Desa berbeda, sehingga menimbulkan kerancuan kebijakan.

“Apakah data Kementerian Desa sama dengan data Kementerian Kehutanan? Ini

menyangkut nasib jutaan keluarga desa,” ujarnya.

Politisi PKS ini mencontohkan kasus di Maluku, di mana masyarakat adat justru dikriminalisasi karena menebang pohon warisan leluhur, sementara perusahaan pemegang konsesi bebas mengeksploitasi hutan.

Menurut wakil rakyat Maluku itu, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Konservasi justru menabrak hak konstitusi

rakyat,” tegas Saadiah.

Selain itu, ia menyoroti kesenjangan ekonomi akibat buruknya infrastruktur. Desa penghasil damar di Kecamatan Inamosul, Maluku, misalnya, kesulitan menjual hasil karena biaya transportasi Rp2 juta, sementara harga jual damar hanya Rp1,7 juta.

“Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau hasil produksinya justru merugikan? Inilah bentuk kemiskinan struktural yang harus segera diatasi,” tambahnya.

FPKS, lanjut Saadiah, mengusulkan revisi regulasi lintas sektor untuk memberi kepastian hak akses desa, termasuk melalui perhutanan sosial, hutan adat, dan pemetaan ulang batas desa secara legal. Ia juga menekankan perlunya integrasi kebijakan antar kementerian dalam satu peta kebijakan terpadu (one policy map), sehingga program pembangunan desa tidak berjalan parsial.

“Tanpa regulasi yang jelas, desa-desa dalam kawasan hutan akan terus menjadi korban, sementara kesejahteraan rakyat hanya jadi slogan,” pungkas Saadiah Uluputty.



FPKS, mengusulkan revisi regulasi lintas sektor untuk memberi kepastian hak akses desa, termasuk melalui perhutanan sosial, hutan adat, dan pemetaan ulang batas desa secara legal. Ia juga menekankan perlunya integrasi kebijakan antar kementerian dalam satu peta kebijakan terpadu (one policy map), sehingga program pembangunan desa berjalan parsial.

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI

# Nevi Zuairina: Pertamina Harus Perkuat Efisiensi, Diversifikasi Pendapatan, dan Jaga Aset Strategis Negara

Jakarta (12/09) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendesak Pertamina untuk memperkuat strategi efisiensi biaya, diversifikasi pendapatan non-migas, dan menjaga keberlanjutan aset strategis negara di tengah tren penurunan harga minyak global.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina beserta jajaran Subholding di Gedung DPR.

"Laporan keuangan yang kami terima menunjukkan adanya penurunan pendapatan sebesar minus 6% akibat harga minyak global turun hingga USD 56 per barel. Pertamina harus memperkuat efisiensi biaya sekaligus diversifikasi pendapatan non-migas agar tetap tangguh menghadapi volatilitas harga energi," tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti pentingnya transparansi kontribusi Pertamina terhadap keuangan negara,

termasuk struktur pajak, PNB, dan keberlanjutan dividen yang disetorkan. "Dividen Pertamina mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Kami ingin memastikan jangan sampai kewajiban setoran negara membebani arus kas perusahaan, apalagi di tengah harga energi yang fluktuatif," ujarnya.

Nevi juga memberikan perhatian serius terhadap turunnya produksi migas nasional dan efektivitas investasi eksplorasi. Ia meminta pemerintah memberi insentif fiskal yang tepat sasaran, bukan hanya menguntungkan kontraktor asing. "Investasi eksplorasi harus efektif, risiko MEK dan COR harus dikenda-

likan, dan kita pastikan insentif fiskal tidak hanya menguntungkan pihak asing tetapi juga mendukung kedaulatan energi nasional," tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menekankan agar roadmap proyek kilang (RDMP dan GRR) tidak menjadi stranded asset akibat transisi energi global. "Pertamina harus memastikan proyek kilang benar-benar ekonomis, mampu menjawab kebutuhan nasional, dan tidak menjadi beban keuangan di masa depan," jelasnya.

Ia juga menyoroti subsidi LPG 3 kg yang masih belum tepat sasaran. "Integrasi data penjabaran setoran negara membebani arus kas perusahaan, apalagi di tengah harga energi yang fluktuatif," kata Nevi.

Selain itu, rejuvenasi armada kapal Pertamina yang sudah berusia 17 tahun juga menjadi sorotannya. "Kami minta rencana pembaruan armada dilakukan secara agresif, agar biaya pemeliharaan tidak mem-



Kami ingin memastikan jangan sampai kewajiban setoran negara membebani arus kas perusahaan, apalagi di tengah harga energi yang fluktuatif,"

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Komisi VI DPR RI

bangkakan dan armada memenuhi standar IMO," ujarnya.

Di bidang energi baru terbarukan (EBT), Nevi meminta kepastian regulasi agar investasi renewable dan bisnis karbon Pertamina dapat berjalan mulus. "Kita ingin Pertamina menjadi pionir dengan target 50% market share energi terbarukan, bukan hanya simbolis, tetapi

betul-betul berkontribusi pada bauran energi nasional," tegasnya.

Terakhir, Nevi menyoroti konsolidasi aset BUMN energi melalui skema dana investasi (INA). "Kami ingin memastikan konsolidasi ini tidak mengurangi kontrol negara terhadap aset strategis. Negara harus tetap memegang kendali penuh," tutup Nevi.



image istimewa

## Ismail Bachtiar Tegaskan Pertamina Harus Percepat Realisasi Target dan Beri Dampak Nyata bagi UMKM

Jakarta (12/09) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja Pertamina agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran Subholding di Gedung DPR RI.

“Saya mengapresiasi capaian Pertamina yang saat ini telah menggandeng 17 ribu UMKM dengan nilai transaksi

“Saya mengapresiasi capaian Pertamina yang saat ini telah menggandeng 17 ribu UMKM dengan nilai transaksi hampir Rp 1 triliun. Ini adalah bukti nyata bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir memberikan manfaat luas untuk rakyat,”

### **ISMAIL BACHTIAR, S.K.M., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan II

hampir Rp 1 triliun. Ini adalah bukti nyata bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir memberikan manfaat luas untuk rakyat,” tegas Ismail Bachtiar.

Meski demikian, Ismail menyoroti bahwa hasil rapat selama ini cenderung masih berupa laporan tanpa disertai jawaban konkrit terhadap berbagai masukan dari Komisi VI. Ia meminta agar Pertamina segera menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan dan memberikan jawaban yang terukur.

“Dari sekian kali kita rapat, hampir semua hanya berbentuk laporan. Hari ini pun baru ada jawaban yang kami terima. Kami harap target produksi 1 juta barel yang sudah

ditetapkan bisa segera kami dapatkan informasi pencapaiannya dengan jelas,” ujar Ismail dengan nada tegas.

Legislator PKS itu menekankan bahwa pencapaian target produksi migas dan keberlanjutan kemitraan dengan UMKM harus menjadi prioritas Pertamina, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Masyarakat menunggu hasil konkret. Kami ingin Pertamina bukan hanya jadi BUMN besar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

# Aleg PKS Alifudin Dorong Penguatan UMKM di Subang Melalui Pelatihan dan Monitoring

Subang (17/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Alifudin, SE. MM., melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Alifudin didampingi oleh jajaran dari Kementerian UMKM serta Wakil Bupati Subang beserta perangkat daerah terkait. Diskusi dan dialog interaktif pun berlangsung bersama para pelaku UMKM di Subang yang hadir di lokasi. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di tengah dinamika ekonomi nasional dan

global.

Alifudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaku UMKM melalui pelatihan yang berkelanjutan dan monitoring yang terstruktur oleh pemerintah. Menurutnya, pelatihan tidak hanya sekedar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga harus mencakup aspek manajerial, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan.

“Pemerintah harus hadir lebih aktif dalam proses pendampingan agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan menjadi lebih kompetitif,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah

dalam mendorong generasi muda untuk terjun ke dunia wirusaha melalui UMKM. Alifudin mendorong agar Pemda, khususnya di Subang, menciptakan program-program pelatihan dan mentoring yang menarik serta relevan dengan minat dan kebutuhan generasi muda.

“UMKM harus menjadi pilihan karier yang menjanjikan, bukan sekadar alternatif. Anak muda perlu difasilitasi agar mereka berani berwirausaha,” ujarnya.

Alifudin juga mengapresiasi keberadaan PLUT KUMKM sebagai pusat layanan yang strategis dalam pengembangan UMKM di daerah. Ia berharap agar fasilitas ini dapat terus ditingkatkan dan lebih proaktif dalam menjangkau pelaku usaha yang masih berada di wilayah terpencil atau belum tersentuh layanan pemerintah.

“Jangan sampai fasilitas ini hanya dinikmati sebagian kecil pelaku UMKM, harus inklusif dan menjangkau semua lapisan,” tambahnya.

Wakil Bupati Subang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Komisi VII DPR RI serta menyatakan kesediaan Pemerintah Kabupaten Subang untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengembangkan ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan.

“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk



“UMKM harus menjadi pilihan karier yang menjanjikan, bukan sekadar alternatif. Anak muda perlu difasilitasi agar mereka berani berwirausaha,”

**H. ALIFUDIN, S.E., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

terus memberdayakan UMKM lokal,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke beberapa unit usaha binaan PLUT KUMKM dan dialog dengan pelaku usaha setempat. Alifudin berharap hasil kunjung-

an ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret yang berpihak pada pelaku UMKM, khususnya dalam hal kemudahan akses pembiayaan, pelatihan berkualitas, dan perluasan pasar.

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atroaktif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



image istimewa

## Fraksi PKS Dorong RUU Kepariwisataan Berbasis Nilai, Inklusif, dan Berkelanjutan

Jakarta (12/09) – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata pada Kamis (11/9). Dalam forum ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku Utara (Malut), Izzudin Alqassam Kasuba

menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Pariwisata harus dijalan-

Promosi pariwisata perlu mengedepankan kekayaan budaya Indonesia sekaligus melibatkan diaspora sebagai duta wisata di kancah global. Ini akan memperkuat branding Indonesia di mata dunia,”

### **IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

kan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya menjaga identitas bangsa dalam industri pariwisata.

Anggota Komisi VII tersebut juga menyoroti aspek keberlanjutan yang harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RUU Kepariwisataan. Ia mengingatkan agar setiap penetapan kawasan strategis wajib memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Jangan sampai pariwisata menimbulkan kerusakan ekologis yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Al Qassam menekankan perlunya keberpihakan pada masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat, menurutnya, harus mendapat ruang dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata sehingga pariwisata menjadi inklusif dan berkeadilan.

Ia juga mendorong agar

UMKM pariwisata mendapatkan dukungan nyata melalui insentif fiskal, pelatihan, hingga digitalisasi layanan.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi pariwisata, sehingga harus difasilitasi agar naik kelas,” jelasnya.

Selain itu, anggota Komisi VII tersebut menilai promosi pariwisata perlu mengedepankan kekayaan budaya Indonesia sekaligus melibatkan diaspora sebagai duta wisata di kancah global.

“Ini akan memperkuat branding Indonesia di mata dunia,” tegasnya.

# Menag Putuskan Peningkatan Kesejahteraan Guru, HNW Apresiasi dan Berharap Benar-Benar Bisa Diwujudkan

Jakarta (11/09) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar yang setelah berakhirnya urusan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama,

langsung memfokuskan diri pada urusan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya terkait kesejahteraan guru.

HNW sapaan akrabnya menyebut bahwa sikap ini tentu bukan kontroversi dan para guru pastinya akan menerima dengan baik perhatian yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama.

“Alhamdulillah, Kemenag bisa mengakhiri penyelenggaraan ibadah haji dengan Indeks sangat memuaskan berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan kemudian tidak berlanjut dengan dipisahkannya

urusan haji dari Kemenag, tapi justru terus bergerak hadirkan kepedulian dan kemajuan di sektor pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Adanya kebijakan kenaikan insentif guru, kuota PPG, juga pengangkatan guru honorer, patut diapresiasi dan harusnya direalisasikan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/9).

Sebelumnya (4/9) Menteri Agama menyebut, pihaknya meningkatkan insentif 227.147 guru non-PNS dari Rp 1,5 juta per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan.

Kemudian sepanjang tahun 2025 sudah ada 206.411 guru yang menjalani

Program Profesi Guru, naik 700 persen dari tahun 2024. Dan sebanyak 52 ribu guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dalam proses penyaluran beragam program tersebut pasti ada prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh para guru. Diharapkan Kemenag bisa membantu dan tidak mempersulit sehingga seluruhnya hak itu bisa terasap optimal, tentu tanpa melanggar aturan yang berlaku,” sambungnya.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menyebut, keberpihakan terhadap guru sejak awal dan telah secara konsisten juga diperjuangkan oleh anggota DPR di Komisi VIII.

Misalnya pada RAPBN 2026 Kementerian Agama, pagu untuk belanja pegawai dan operasional di mana salah satu komponen utamanya adalah tunjangan guru dan gaji PPPK berhasil ditingkatkan dari Rp 36,9 Triliun pada indikatif awal menjadi Rp 49,3 Triliun.

Bahkan pada rapat Kerja



Adanya kebijakan kenaikan insentif guru, kuota PPG, juga pengangkatan guru honorer, patut diapresiasi dan harusnya direalisasikan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya,”

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

terakhir dengan Menteri Agama terkait pembahasan RKA K/L (3/9), kembali disepakati usulan tambahan anggaran dari Kemenag sebesar Rp 21,7 Triliun, di antaranya untuk program revitalisasi madrasah dan digitalisasi pendidikan.

“Melalui upaya ini diharapkan terjadi peningkatan signifikan pada kualitas pendidikan keagamaan. Dan Menag bersama seluruh

personilnya yang tidak lagi disibukkan menjadi penyelenggara haji, harusnya bisa fokus merealisasikan hal ini sebagai kegiatan utama di Kementerian Agama, menghadirkan pendidikan dan hasil pendidikan serta lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang unggul, dari tingkat RA/TK hingga Perguruan Tinggi,” pungkasnya.



# Surahman Hidayat Apresiasi Polri dan Dorong Pemulihan Menyeluruh bagi Korban Penganiayaan Anak

Jakarta (15/09) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras atas tindakan tidak berperikemanusiaan dalam kasus dugaan penganiayaan anak MK (7) yang ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

MK (7) ditemukan dalam kondisi mengenaskan luka bakar di wajah, patah tulang, memar di seluruh tubuh, dan tanda-tanda malnutrisi, mengalami trauma berat secara psikologis, serta belum mampu berkomunikasi secara lancar dan menunjukkan ketakutan ekstrem terhadap pelaku.

Surahman memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dan RS Polri Kramat Jati, atas tindakan cepat dan profesional dalam penyelamatan MK dari lokasi kejadian, penanganan medis dan psikologis yg

profesional terhadap korban.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas tindakan cepat Polri dalam penyelamatan korban anak MK. Langkah hukum yang tegas terhadap dua pelaku dalam kasus dugaan penganiayaan anak MK menunjukkan komitmen Polri dalam melindungi anak-anak dari tindak kriminal," imbuh Surahman.

Legislator FPKS yang bertugas di komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama dan sosial ini juga mendesak penegakan hukum secara maksimal atas tindak kejahatan terhadap anak yang telah dilakukan oleh EF (40)

alias "Ayah Juna" yang merupakan pasangan sejenis dari ibu korban SNK (42).

"Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral bangsa. Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan," ujar Surahman.

Saat ini MK (7) berada dalam perawatan intensif di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. MK (7) sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan fisik, termasuk peningkatan berat badan dan respons terhadap lingkungan aman dan juga telah mendapatkan pendampingan dari psikolog anak dan pekerja sosial.

Selain harus mendapatkan perawatan intensif untuk pemulihan fisik.

Surahman juga mengatakan pentingnya pendampingan psikologis jangka panjang bagi MK agar dapat pulih dari trauma berat yang dialaminya, serta penempatan MK di lembaga penguasaan resmi yang menja-



"Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral bangsa. Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan,

**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

min hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.

"Pemulihan MK tidak cukup hanya dengan perawatan medis. MK membutuhkan pendampingan psikologis jangka panjang dan lingkungan penguasaan yang aman, sehat,

dan penuh kasih. Negara wajib hadir secara utuh untuk menjamin bahwa setiap anak korban kejahatan untuk mendapatkan haknya kembali—hak untuk merasa aman, untuk belajar, untuk tumbuh, dan berkembang secara baik," pungkas Surahman.



## Satu dari 10 Produk Kesehatan di RI Bermasalah, DPR: Negara Harus Lindungi Konsumen

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, menyoroti laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebut 1 dari 10 produk kesehatan di Indonesia teridentifikasi palsu, ilegal, atau bermutu rendah.

“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan akibat lemahnya pengawasan peredaran obat ditambah kurangnya wawasan masyarakat,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/9).

Netty meminta BPOM dan Kementerian Kesehatan memperkuat sistem pengawasan pasca-edar, termasuk melakukan sampling produk secara acak di berbagai daerah, bukan hanya di kota besar. Menurutnya, pengawasan yang merata penting untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat hingga pelosok.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum

terhadap produsen, distributor, maupun penjual produk ilegal atau palsu.

“Sanksi tegas harus dijatuhkan agar ada efek jera. Keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan segelintir pihak,” tegas politisi PKS tersebut.

Selain pengawasan dan penindakan, Netty menilai edukasi masyarakat perlu digencarkan. Ia mendorong kampanye luas tentang cara memilih produk kesehatan yang aman dengan prinsip Cek-KLIK: Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.

“Literasi konsumen sangat penting. Masyarakat harus kritis dan waspada sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik, atau produk tradisional, baik secara

offline maupun online,” ungkapnya.

Lebih jauh, Netty mendesak adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga platform e-commerce. Ia menyebut kanal daring kini menjadi jalur utama peredaran produk ilegal yang sulit terkontrol.

“Semua pihak harus mengambil tanggung jawab. Negara wajib hadir melindungi rakyat dari produk berbahaya, sementara platform daring juga tidak boleh lepas tangan,” katanya.

Sebagai penutup, Netty menegaskan bahwa strategi jangka panjang dalam menjamin mutu produk kesehatan perlu segera disusun.

“Kita tidak bisa hanya reaktif, tapi harus juga proaktif menjaga kesehatan rakyat. Setiap produk yang beredar di pasaran harus benar-benar aman dan bermanfaat,” pungkasnya.



“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan akibat lemahnya pengawasan peredaran obat ditambah kurangnya wawasan masyarakat,

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI



## Soroti Anggaran Jumbo BGN, Achmad Ru'yat Minta Program Makan Bergizi Gratis Lebih Tepat Sasaran

Jakarta (16/09) -- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait alokasi anggaran dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Selasa (16/09).

Achmad Ru'yat menyoroti struktur APBN 2026 yang menunjukkan porsi besar untuk BGN dalam anggaran pendidikan. Kondisi ini membuat anggaran pendidikan non-program MBG lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022.

"Mohon hal ini menjadi perhatian, agar keseimbangan anggaran pendidikan tetap terjaga," ujar Achmad Ru'yat.

Ia juga kembali mengusulkan agar anggaran program MBG diberikan secara lebih tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang tidak menerapkan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat, melainkan berbasis kebutuhan dan partisipasi.

Selain menyoroti kebijakan anggaran, Achmad Ru'yat mengingatkan perlunya evaluasi

tata kelola distribusi program MBG di lapangan. Ia mencontohkan distribusi MBG di Desa Batununggal, yang dilaporkan diterima hingga malam hari oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jam distribusi yang terlalu malam tentu menyulitkan penerima manfaat. Ini harus menjadi evaluasi agar program berjalan efektif," tegasnya.

Ia mengusulkan agar pihak penyelenggara program MBG, termasuk sekolah, memberikan

laporan yang lebih akuntabel.

"Kalau perlu menu mingguan dan bulanan dipublikasikan, dan sekolah memfoto makanan yang diterima siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik," tambahnya.

Achmad Ru'yat juga mengapresiasi BPOM yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,742 miliar untuk bidang penindakan, setelah sebelumnya sempat dikritisi karena anggarannya nol.

Ia menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan agar program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita dan MBG, dapat berjalan sukses tanpa menggeser prioritas sektor pendidikan lainnya. Dengan demikian, tata kelola anggaran diharapkan semakin profesional dan keseimbangan sektor pendidikan tetap terjaga.

"Kalau perlu menu mingguan dan bulanan dipublikasikan, dan sekolah memfoto makanan yang diterima siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,"

**drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



## Soroti Serapan Anggaran BGN, Gamal Albinsaid Tekankan Pencegahan Belanja Tergesa dan KKN

Jakarta (15/09) – Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya dari Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, memberikan sejumlah catatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/09).

Legislator Fraksi PKS tersebut menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang baru mencapai 18,6 persen, yang menuhnyakan menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran dan berpotensi menimbulkan belanja tergesa di akhir tahun.

“Kalau tidak dimitigasi, akan mengurangi mutu layanan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti komposisi belanja BGN yang 97,7 persennya berupa belanja barang. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan praktik KKN, dengan belajar dari kasus dana desa di mana banyak kepala desa akhirnya tersangkut masalah hukum.

“Apa strategi BGN untuk meminimalisir risiko KKN terjadi? Misalkan kita bisa belajar dari dana desa, akhirnya banyak kepala desa tersangkut kasus KKN. Saya harap hal serupa tidak terjadi di BGN,” jelasnya.

Ia menegaskan anggaran besar BGN harus memiliki indikator terukur, baik target

penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, maupun kepastian standar halal.

“Dengan anggaran yang cukup besar perlu ada indikator yang jelas, seperti target penurunan stunting atau peningkatan skor literasi gizi. Termasuk juga agar standar halal tidak lagi diragukan,” ujarnya.

Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya itu juga

mengusulkan adanya kebijakan local first dalam pengadaan agar lebih berdampak pada ekonomi lokal.

“Pengadaan perlu ada skema kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan Bumdes. Skema ini bisa dimasukkan dalam dokumen pengadaan agar lebih berdampak,” ucapnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi standar.

“BGN jangan ragu memberikan sanksi kepada SPPG. Bisa belajar dari star rating atau paid for quality, agar kualitas tetap terjaga. Mekanisme pencairan juga bisa dilakukan bertahap sesuai kepatuhan,” tegasnya.

“Dengan anggaran yang cukup besar perlu ada indikator yang jelas, seperti target penurunan stunting atau peningkatan skor literasi gizi. Termasuk juga agar standar halal tidak lagi diragukan

**dr. GAMAL ALBINSaid**  
Anggota Komisi IX DPR RI

# Komisi IX FPKS Muh. Haris Soroti Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kemitraan Penta Helix dalam Program BKKBN

Jakarta (15/09) — Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, menyampaikan apresiasi atas kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk BKKBN.

Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait efisiensi anggaran dan perlunya optimalisasi program melalui kemitraan lintas sektor.

Muh. Haris mencermati bahwa meskipun anggaran mengalami kenaikan, nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya serta tingginya proporsi belanja operasional dalam anggaran BKKBN yang dinilai belum memberikan dampak langsung yang signifikan kepada masyarakat.

"Kalau saya cermati, lebih dari Rp3,2 triliun anggaran dialokasikan untuk belanja

operasional. Artinya, belanja yang langsung berdampak terhadap masyarakat itu relatif kecil," ujarnya

Lebih lanjut, Muh. Haris menyoroti adanya penurunan anggaran sebesar Rp219 miliar dibandingkan dengan tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, ia mendorong Menteri BKKBN untuk memperkuat strategi kemitraan pentahelix, yakni kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, guna menyukseskan program-program strategis kependudukan dan keluarga berencana.

"Pak Menteri perlu betul-

betul memikirkan strategi kemitraan pentahelix yang lebih kuat. Pelibatan sektor swasta, komunitas, hingga tokoh masyarakat akan sangat membantu dalam pencapaian target program," jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh lapangan. Ia menilai, semangat dan metode penyuluhan yang efektif seperti di masa lalu perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Dulu para penyuluh itu luar biasa. Mereka turun langsung ke kampung-kampung, memberikan penyuluhan dengan pendekatan yang tegas dan menyentuh. Saya kira pendekatan semacam itu perlu dikembangkan kembali, tentu dengan penyesuaian zaman," tambahnya.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan evaluasi Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BKKBN. Komisi IX menegaskan komitmennya



"Dulu para penyuluh itu luar biasa. Mereka turun langsung ke kampung-kampung, memberikan penyuluhan dengan pendekatan yang tegas dan menyentuh. Saya kira pendekatan semacam itu perlu dikembangkan kembali, tentu dengan penyesuaian zaman,"

**Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

untuk terus mendorong efektivitas penggunaan anggaran negara agar benar-

benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

*Live*  
*Interactive*  
Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



BERSAMA M. ADRIAN RASHAD



**Saksikan**  
**Setiap Jum'at**  
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





image istimewa

## Fikri Faqih Minta Kemendikdasmen Kawal Anggaran Pendidikan, Soroti Nasib Guru Honorer dan Sekolah Rusak

Jakarta (16/09) --- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti sejumlah isu krusial dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), membahas penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2026.

Dalam rapat yang digelar Senin (15/9/2025) di ruang rapat Komisi X, anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya pengawalan anggaran untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, termasuk bagi para guru honorer.

Pria yang akrab disapa Fikri ini menyoroti beberapa poin mendesak. Yang pertama adalah agar Program Indonesia Pintar (PIP) tetap dapat direalisasikan untuk jenjang PAUD dan TK, meskipun ada penyesuaian anggaran.

Selain itu, ia mendesak pemerintah segera menuntaskan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah lulus namun belum mendapat alokasi anggaran, padahal, menurut Fikri Faqih, alokasi anggaran untuk para guru honorer tersebut sudah tersedia.

"Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari

Bapak Menteri (Mendikdasmen) juga begitu, lewat Transfer ke Daerah (TKDD). Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia," tegasnya.

Fikri juga menggarisbawahi rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN. Jika sebelumnya gaji mereka sebesar Rp300 ribu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan menjadi Rp500 ribu.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai niat ini sangat baik dan harus diprioritaskan dalam anggaran yang sedang berjalan.

Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Ia mengungkapkan, banyak laporan yang masih diterima Komisi X

## Fikri Faqih Minta Kemendikdasmen Kawal Anggaran Pendidikan, Soroti Nasib Guru Honorer dan Sekolah Rusak

### « SEBELUMNYA

mengenai kondisi sekolah-sekolah yang ambruk.

Politisi dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini juga berharap tekad Presiden untuk menuntaskan revitalisasi sarana dan prasarana dalam tiga tahun ke depan dapat terealisasi dan terus dikawal.

Terkait isu literasi, Fikri menyoroti perubahan status Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang kini menjadi

lembaga mandiri, tidak lagi di bawah Kemendikdasmen.

Ia khawatir, jika literasi masyarakat tidak dipantau dengan baik, yang akan disalahkan tetap kementerian ini.

"Dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas. Sekarang jadi lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita jadikan referensi utama," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta agar Badan Bahasa dan Perpusnas menjalin kerja sama yang erat untuk memantau program-

program literasi.

Meskipun demikian, Fikri menyatakan bahwa PKS tetap menyetujui anggaran sebesar Rp400 miliar untuk Kemendikdasmen.

Namun, ia menekankan agar kementerian tidak berpuas diri dan tetap mengawal seluruh catatan yang diberikan.

Fikri menegaskan bahwa pengawasan ini penting, karena pada akhirnya Kemendikdasmen lah yang akan menjadi pengguna akhir dari anggaran tersebut.

"Kami dari PKS tetap menyetujui Rp400 miliar itu, tetapi jangan puas. Catatan-catatan yang diberikan itu supaya dikawal, sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Kemendikdasmen, tapi lewat Kementerian Keuangan," pungkasnya.



"Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Bapak Menteri (Mendikdasmen) juga begitu, lewat Transfer ke Daerah (TKDD). Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia,"

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Komisi X DPR RI



## Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Pengawasan Akreditasi Sekolah

Jakarta (16/09) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya pengawasan dalam proses akreditasi sekolah agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan lembaga pendidikan.

Hal ini ia sampaikan dalam agenda penyampaian aspirasi Yayasan Ash-Shaff Palembang yang menaungi Sekolah Islam Terpadu (SIT) Bina Ilmi, terkait permasalahan akreditasi sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Yayasan Ash-Shaff menyampaikan bahwa proses akreditasi yang dilakukan secara otomatis (automatis) tanpa visitasi menimbulkan kerancuan. Beberapa sekolah yang seharusnya memperoleh nilai akreditasi lebih rendah justru mendapat peringkat tinggi, sementara sekolah dengan rekam jejak baik justru terhambat. Kondisi ini dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan sekolah-sekolah swasta yang selama ini memiliki standar mutu tinggi.

Menanggapi hal itu, Ledia menegaskan bahwa proses akreditasi pendidikan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pengawasan pemerintah provinsi. Menurutnya, adanya pengawasan dari tingkat provinsi merupakan bentuk proteksi agar kebijakan yang diambil lebih trans-

paran, akuntabel, dan berpihak pada mutu pendidikan.

“Tidak semua hal yang terlihat bagus hasilnya akan benar-benar berhasil bagus. Proses pengawasan itu penting untuk terus kita komunikasikan, karena urusan birokrasi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Asesor yang profesional memang ada, tapi laporan terkait asesor yang tidak bekerja dengan baik juga tidak sedikit. Fraksi PKS

hadir untuk memperjuangkan agar hal-hal seperti ini bisa diperbaiki,” tegas Ledia.

Ledia juga mengemukakan bahwa akreditasi seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar administrasi formal yang justru menimbulkan masalah baru. Ia meminta agar para pemangku kepentingan di level pusat dan daerah membuka ruang komunikasi lebih luas dengan yayasan maupun sekolah.

“Mohon bersabar, karena kita sedang berhadapan dengan manusia, dan itu tidak bisa dipungkiri. Namun yang penting, keberadaan Fraksi PKS adalah untuk memastikan ada upaya perbaikan nyata demi kepentingan dunia pendidikan,” pungkasnya.

“Tidak semua hal yang terlihat bagus hasilnya akan benar-benar berhasil bagus. Proses pengawasan itu penting untuk terus kita komunikasikan, karena urusan birokrasi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Asesor yang profesional memang ada, tapi laporan terkait asesor yang tidak bekerja dengan baik juga tidak sedikit. Fraksi PKS hadir untuk memperjuangkan agar hal-hal seperti ini bisa diperbaiki,”

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

# Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Dorong Pemerintah Penuhi Tambahan Anggaran Pendidikan: 0,7 Persen Masih Jauh dari Kebutuhan

Jakarta (15/09) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tambahan anggaran di sektor pendidikan dasar dan menengah.

Ia menilai alokasi tambahan anggaran yang baru terpenuhi sebesar Rp400 miliar atau hanya 0,7 persen masih jauh dari kebutuhan.

Hal ini disampaikan Kurniasih dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR RI (Banggar) yang telah mengawal proses pembahasan ini, namun juga mengingatkan pentingnya

komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Tambahan anggaran yang disetujui baru 0,7 persen. Kami menyukuri ini, tetapi jelas masih sangat jauh dari kebutuhan riil. Kami berharap dengan ikhtiar bersama, baik dari DPR maupun pemerintah, alokasi ini bisa terus meningkat demi mendukung kesuksesan program pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurniasih menegaskan bahwa kualitas pendidikan bergantung pada pilar utama yakni guru, tenaga pendidik, dan tenaga

kependidikan. Ia juga menyoroti pentingnya mendukung program prioritas nasional, termasuk wajib belajar 13 tahun yang menjadi komitmen pemerintah.

“Keberhasilan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran guru. Kualitas pembelajaran dan pengajaran ada di tangan mereka. Karena itu, anggaran pendidikan harus betul-betul memperhatikan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pendidik,” tambahnya.

Politisi PKS tersebut juga menyatakan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan membersamai pemerintah dalam memastikan setiap program pembangunan pendidikan dapat terealisasi secara maksimal. Ia juga meyakini Presiden memiliki kepedulian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.



“Keberhasilan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran guru. Kualitas pembelajaran dan pengajaran ada di tangan mereka. Karena itu, anggaran pendidikan harus betul-betul memperhatikan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pendidik,”

**Dr. Hj. KURNIASIH  
MUFIDAYATI, M.Si.**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI



# Sambut Menkeu Baru, Amin Ak Tekankan Kredibilitas Fiskal dan Pemulihan Kepercayaan Investor

Jakarta (10/09) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Menurut Amin, kehadiran Purbaya sebagai Menkeu patut diapresiasi mengingat sebelumnya sudah berpengalaman menjadi mitra Komisi XI saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami menyambut baik Pak Purbaya. Harapan saya beliau bisa melanjutkan yang sudah baik dilakukan Bu Sri Mulyani sekaligus meningkatkan hal-hal yang masih kurang," ujar Amin, Rabu (10/9).

Amin menekankan bahwa tantangan awal Purbaya adalah beradaptasi dengan birokrasi Kementerian Keuangan serta memastikan tiga Wakil Menteri

Keuangan dapat bekerja efektif berbagi beban dengan Menterinya.

Menurutnya, 100 hari pertama sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan pasar, terutama setelah rupiah dan IHSG sempat tertekan pasca pengumuman reshuffle kabinet.

"Stabilitas pasar akan sangat ditentukan oleh 100 hari pertama Purbaya. Kuncinya adalah membangun kredibilitas, menjaga disiplin fiskal, serta menghadirkan kebijakan yang adil dan menenangkan publik," tegasnya.

Amin juga mengingatkan

agar pemerintah tidak terjebak pada solusi fiskal berbasis utang maupun pajak tambahan yang justru membebani masyarakat.

"Kita tidak boleh terjebak kondisi gali lubang tutup lubang. Reformasi perpajakan harus diarahkan agar lebih adil, memperluas basis pajak, sekaligus melindungi masyarakat kelas bawah," jelasnya.

Dalam pandangan Amin, sejumlah prioritas kebijakan perlu segera dijalankan Menkeu Purbaya.

Antara lain mendorong stimulus likuiditas untuk sektor padat karya dan rantai pasok terdampak geopolitik, dan memperkuat kolaborasi dengan swasta lewat proyek siap pakai dan insentif terukur.

Kemudian memprioritaskan pembangunan infrastruktur logistik, perumahan rakyat, dan pengolahan pangan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Amin juga menekankan pentingnya stimulus konsumsi yang lebih terarah seperti voucher untuk UMKM, subsidi bertarget, dan dukungan likuiditas agar produksi lokal tetap berjalan.

Selain itu, pemulihan rantai pasok dan ekspor perlu dilakukan melalui intervensi bottleneck logistik, pemberian insentif pada ekspor bernilai tambah, dan dukungan fiskal sementara bagi sektor terdampak geopolitik.

la menegaskan, percepat-



“Stabilitas pasar akan sangat ditentukan oleh 100 hari pertama Purbaya. Kuncinya adalah membangun kredibilitas, menjaga disiplin fiskal, serta menghadirkan kebijakan yang adil dan menenangkan publik,”

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

an realisasi proyek infrastruktur yang benar-benar "ready to build" dengan lelang cepat dan pengawasan ketat harus dipastikan agar manfaatnya segera dirasakan publik.

Sementara itu terkait target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden, Amin

mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi jangan mengorbankan disiplin fiskal. Kredibilitas kebijakan dan keadilan harus menjadi fondasi utama," tutup Amin.

# Legislator PKS Soroti Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang Menurun

Jakarta (12/09) --- Anggota DPR RI Anis Byarwati mencermati turunnya angka Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025 lalu.

Pada Agustus 2025, IKLK kembali masuk ke zona pesimis yakni di bawah 100 atau tercatat sebanyak 93,2, sehingga menjadikan IKLK empat bulan berurut-turut berada di area pesimis sejak Mei 2025.

"Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/9).

Legislator PKS ini mengungkap selain IKLK, BI juga mengungkap terjadinya penurunan

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025. IKK digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. BI menyebut IKK Agustus menurun ke level 117,2 dari sebelumnya 118,1 dibulan Juli.

"Meskipun masih di level optimis karena masih di atas 100, namun eksekutif perlu merespon terhadap penurunan IKK, karena angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini berpandangan bahwa melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen akan berdampak pada melemahnya konsumsi

masyarakat.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru, yaitu fokus mengupayakan peningkatan konsumsi masyarakat dan daya beli, karena berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat disebut investasi akan bergerak juga," ujarnya.

Anis berpendapat Menkeu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mendorong naiknya daya beli masyarakat atau konsumsi, salah satu solusinya adalah dengan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Ide menaikkan PTKP pada 2 tahun lalu PKS pernah menyampaikan, kebijakan ini berpotensi mendorong perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat," paparnya.

Pilihan kebijakan lainnya untuk menaikkan optimisme konsumen menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini adalah dengan beragam kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, ataupun \_cash transfer\_.



“Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,”

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

# Ateng Sutisna Dorong Debat Akademis Terbuka atas Dibukanya Kembali Tambang Nikel di Raja Ampat

Jakarta (16/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan Kementerian ESDM yang membuka kembali izin operasional PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi merusak ekosistem pulau kecil dan laut di sekitarnya yang tidak dapat dipulihkan kembali, mengancam kehidupan masyarakat adat, serta menghancurkan potensi pariwisata yang selama ini menjadi ikon Raja Ampat.

“Raja Ampat adalah permata dunia dengan keanekaragaman hayati terestrial, pesisir, dan laut yang tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Pemerintah harus transparan

dalam kajian lingkungan dan menjamin perlindungan terhadap kekayaan non-tambang tersebut,” tegas Ateng.

Ia juga menyoroti dasar hukum yang dipakai, yaitu bahwa di luar kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan, aktivitas di pulau-pulau kecil diperkenankan sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan maupun sosial. Menurutnya, ketentuan ini harus diuji silang dengan analisis dampak lingkungan

(AMDAL) yang menjadi dasar keputusan.

“Apakah benar ada kajian yang menjamin tambang ini tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap terumbu karang dan laut Raja Ampat? Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan?” ujarnya.

Ateng mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan konservasi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipulihkan. Terumbu karang yang rusak, pencemaran air laut, hilangnya habitat satwa endemik, hingga terganggunya rantai ekosistem laut akan menjadi ancaman jangka panjang bagi Papua dan Indonesia.

“Sudah banyak kajian yang menunjukkan risiko besar dari aktivitas tambang di kawasan konservasi. Jika terumbu karang hancur, maka ekosistem laut runtuh. Nelayan akan kehilangan mata pencaharian, pariwisata akan mati, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Dampak ini bukan hanya hari ini, tetapi akan diwariskan sebagai bencana ekologis kepada generasi mendatang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ateng menegaskan bahwa DPR akan mendorong Kementerian ESDM untuk meninjau ulang izin operasi PT GAG Nikel, menghentikan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi,



“Sudah banyak kajian yang menunjukkan risiko besar dari aktivitas tambang di kawasan konservasi. Jika terumbu karang hancur, maka ekosistem laut runtuh. Nelayan akan kehilangan mata pencaharian, pariwisata akan mati, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup

## **Ir. H. ATENG SUTISNA**

Anggota Komisi XII DPR RI

memperkuat pengawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat adat, serta menjadikan Raja Ampat sebagai pusat ekowisata dunia, bukan objek eksploitasi tambang.

“Kerusakan di Raja Ampat akan menjadi kerugian

permanen, bukan hanya bagi Papua, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia. Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga warisan alam ini bagi generasi mendatang,” pungkasnya.



image istimewa

## Meitri Citra Wardani Dukung Penguatan Tata Kelola Migas Aceh demi Kesejahteraan Masyarakat

Aceh (15/09) – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menegaskan perlunya penguatan tata kelola sektor minyak dan gas (migas) di Aceh agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya mencapai swasembada energi.

Hal ini ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di Aceh yang berlangsung sejak tanggal 11-13 September 2025.

Meitri mengungkapkan, secara geologi Aceh memiliki potensi hidrokarbon besar, baik onshore maupun offshore, khususnya di Blok Andaman I, II, dan III yang masing-masing diperkirakan menyimpan cadangan gas bumi sekitar 6 triliun kaki kubik (TCF).

Kendati begitu, kontribusi sektor ini terhadap fiskal daerah dinilai masih sangat rendah. Pada tahun 2023 misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Aceh hanya Rp252,67 miliar, atau kurang dari 1% dari total APBD Aceh 2024 yang mencapai Rp36,26 triliun.

"Potensi migas Aceh sangat besar, tetapi kontribusinya ke ekonomi daerah belum cukup maksimal. Untuk itu, kami mendorong BPMA

bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperbaiki tata kelola yang kurang efektif dan segera mempercepat monetisasi cadangan migas ini agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat Aceh," ujar Meitri.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu diatasi agar pengelolaan migas Aceh memberi dampak yang optimal. Meitri mengungkapkan, banyak lapangan migas tua seperti Arun yang telah memasuki fase penurunan produksi (decline), sehingga memerlukan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

"Selain itu, kami mencermati bahwa keterbatasan infrastruktur gas seperti jaringan pipa ARBAN, terminal, dan jaringan distribusi menyebabkan cadangan gas belum dapat disalurkan optimal ke industri lokal dan jaringan kelistrikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR

## Meitri Citra Wardani Dukung Penguatan Tata Kelola Migas Aceh demi Kesejahteraan Masyarakat

### « SEBELUMNYA

Dapil Jawa Timur VIII ini mengingatkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tidak hanya fokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap pelibatan masyarakat lokal dalam ekosistem bisnis hulu minyak dan gas (migas). Meitri menilai pelibatan warga lokal adalah wujud komitmen kontraktor dalam membangun ekosistem industri energi yang inklusif dan berkeadilan.

“Keterlibatan mereka dapat menciptakan sense of ownership atau rasa kepemilikan guna memperkuat dukungan sosial dan meminimalisir potensi konflik sosial antara kontraktor dengan lingkungan setempat,” ujarnya.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menambahkan, pelibatan masyarakat lokal tidak sebatas pada penyerapan tenaga kerja semata, tetapi juga dengan menjalin program kemitraan UMKM, kerjasama penyediaan jasa dan barang,

hingga penuaian program pemberdayaan yang relevan dengan potensi dan kebutuhan wilayah setempat.

“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian KKKS agar kontribusi ekonomi dari perusahaan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal. Pengelolaan migas Aceh tidak boleh hanya menguntungkan pusat atau korporasi. Harus ada keberpihakan nyata bagi masyarakat Aceh, terutama dalam bentuk penerimaan daerah, kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur energi guna mendorong peningkatan akses energi yang berkeadilan serta pemerataan ekonomi bagi masyarakat,” pungkas Meitri.



“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian KKKS agar kontribusi ekonomi dari perusahaan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal. Pengelolaan migas Aceh tidak boleh hanya menguntungkan pusat atau korporasi.

**Hj. MEITRI CITRA  
WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

## Meity Rahmatia Soroti Anggaran Mitra Komisi XIII: Tekankan Efisiensi dan Dampak Nyata untuk Masyarakat

Jakarta (15/09) — Dalam rapat kerja bersama Pemerintah, Kepala BNPT, BPJ dan Ketua LPSK. Anggota Komisi XIII DPR RI FPKS, Meity Rahmatia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penyesuaian pagu indikatif tahun anggaran 2026.

Beliau menekankan pentingnya efisiensi belanja dan orientasi anggaran yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Sebelumnya mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp6,36 triliun, namun setelah penyesuaian ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun, dan akhirnya disepakati

"Saya mengharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya terserap untuk belanja pegawai, tapi betul-betul memberi dampak nyata terhadap pelayanan hukum masyarakat."

**Hj. MEITY RAHMATIA,  
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

menjadi Rp4,25 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,19 triliun atau hampir 80% dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen.

"Saya mengharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya terserap untuk belanja pegawai, tapi betul-betul memberi dampak nyata terhadap pelayanan hukum masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meity turut menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,132 triliun, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada naiknya tarif layanan hukum, termasuk tarif jasa notaris yang semakin mahal.

"Bagaimana strategi agar target PNBP ini tidak membebani masyarakat Kita

tidak ingin akses terhadap hukum menjadi hak eksklusif karena biaya yang tidak terjangkau," tegasnya.

Terkait program prioritas nasional, ia menyoroti alokasi Rp50,1 miliar untuk bantuan hukum litigasi dari total Rp843 miliar untuk 20 output prioritas nasional, termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Mengakhiri pernyataannya, Anggota Komisi XIII tersebut kembali menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja dukungan manajemen dan menuntut agar lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**



image istimewa

## Aleg PKS Reni Astuti Soroti Kesiapan Anggaran Implementasi RUU PPRT

Jakarta (10/09) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, menekankan pentingnya kesiapan anggaran dalam implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini berlangsung di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/09).

Reni menyampaikan bahwa secara umum seluruh fraksi, termasuk pimpinan Baleg sepakat agar RUU PPRT segera diselesaikan, sehingga dapat mulai dioperasikan pada tahun 2026.

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapan anggarannya. Karena pembahasan APBN 2026 sedang ber-

langsung, baik di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini perlu dipastikan agar ketika RUU ini ditetapkan, bisa langsung dijalankan pada 2026,” tegas Reni.

Ia menekankan bahwa alokasi anggaran menjadi aspek krusial agar mandat yang diatur dalam pasal-pasal RUU PPRT, termasuk program pendukungnya, dapat terlaksana secara efektif.

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapan anggarannya. Karena pembahasan APBN 2026 sedang berlangsung, baik di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini perlu dipastikan agar ketika RUU ini ditetapkan, bisa langsung dijalankan pada 2026,”

**RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**

Anggota Komisi X DPR RI

# Pembahasan RUU P2MI, Ledia Hanifa Soroti Pengawasan P3MI dan Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta (10/09) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa, menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait perlindungan pekerja migran dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI).

Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini menghadirkan Komnas Perempuan dan Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum, berlangsung di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/09).

Ledia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang kerap lalai memenuhi standar minimal pelatihan dan perlindungan bagi pekerja migran. Ia mengungkapkan adanya praktik penandatanganan kontrak mendadak sebelum keberangkatan dengan bahasa

negara tujuan, yang seringkali berisi kewajiban kerja 24 jam tanpa libur.

"Kalau kualifikasi P3MI benar-benar terpenuhi, konflik dengan pemberi kerja bisa diminimalisir. Sayangnya, praktik di lapangan masih jauh dari ideal," tegas Ledia.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pekerja migran sektor nelayan yang kerap dikategorikan sebagai pelaut tanpa memiliki kualifikasi maupun perlindungan hukum yang layak. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kerentanan serius, termasuk kasus kecelakaan kerja yang tidak

ditanggung asuransi.

Lebih lanjut, Ledia menegaskan perlunya diplomasi yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan PMI di negara tujuan, mengingat perbedaan regulasi yang signifikan antarnegara.

"Undang-undang ini harus melindungi seluruh pekerja migran, baik mereka yang bekerja di sektor domestik maupun profesional. Bahkan, ada yang berangkat ke luar negeri setelah menempuh pendidikan tinggi. Mereka seharusnya bisa melanjutkan karier sesuai kualifikasi yang dimiliki, bukan kembali dipaksa melalui mekanisme lama," jelasnya.

Ledia menutup dengan menegaskan bahwa RUU P2MI harus menjadi instrumen perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia, sekaligus membuka ruang transformasi karier bagi mereka di masa depan.



"Undang-undang ini harus melindungi seluruh pekerja migran, baik mereka yang bekerja di sektor domestik maupun profesional. Bahkan, ada yang berangkat ke luar negeri setelah menempuh pendidikan tinggi. Mereka seharusnya bisa melanjutkan karier sesuai kualifikasi yang dimiliki, bukan kembali dipaksa melalui mekanisme lama,"

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI



image istimewa

## Yanuar Arif Tekankan Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi RUU PPRT

Jakarta (10/09) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)

melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini berlangsung di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/09).

“Undang-undang ini sudah lama dinantikan. Pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, harus menyiapkan diri terkait pelaksanaan mandat UU ini, mulai dari vokasi hingga optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat maupun daerah,”

### H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Komisi XIII DPR RI

Yanuar menyoroti sektor pekerja rumah tangga (PRT) sebagai sektor non-formal yang selama ini minim perlindungan, padahal jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta pekerja.

“Undang-undang ini sudah lama dinantikan. Pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, harus menyiapkan diri terkait pelaksanaan mandat UU ini, mulai dari vokasi hingga optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat maupun daerah,” ujar Yanuar.

Lebih lanjut, Yanuar juga mengusulkan agar lembaga pendidikan non-formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dapat dilibatkan dalam memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang mempersiapkan diri menjadi pekerja rumah tangga terlatih.

Ia menambahkan, Kaukus

Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) yang selama ini fokus pada advokasi pekerja rumah tangga, perlu mengambil peran lebih seimbang dalam melindungi baik pekerja maupun pemberi kerja.

“Selama ini PRT sering menjadi pihak yang lemah. Namun kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada kasus di mana pemberi kerja juga menjadi korban. Undang-undang ini harus menempatkan kedua belah pihak secara setara di mata hukum,” jelasnya.

Yanuar menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RUU PPRT akan sangat ditentukan oleh kesiapan kementerian terkait sebagai eksekutor, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.



## Israel Serang Qatar, BKSAP: Tatanan Hukum Internasional Hancur

Jakarta (12/09) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengutuk serangan Israel yang menghantam wilayah Qatar pada 9 September 2025,

menewaskan 6 korban jiwa dan menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Timur Tengah.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tindakan serangan semacam ini melanggar prinsip

dasar hukum internasional dan kedaulatan negara. "Nyawa enam orang yang terenggut pada serangan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Indonesia melalui BKSAP mendesak agar semua pihak menghormati kemanusiaan dan membebaskan jalur diplomasi," tegas anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini.

Lebih lanjut, setelah serangan ini, dunia internasional ikut mengecam peristiwa tersebut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Security Council) dengan dukungan Amerika Serikat mengecam aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar.

BKSAP DPR RI juga menyerukan agar komunitas internasional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama

Islam (OKI), segera menanggapi secara kolektif; mengecam agresi, dan mendesak supaya hukum internasional ditegakkan.

Selain itu, BKSAP DPR RI menekankan bahwa hanya dengan dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kerja sama internasional nyata, konflik yang berkepanjangan dapat diredakan. Indonesia terus berkomitmen pada diplomasi bebas aktif dan akan menggunakan seluruh jalur diplomatik dan parlemen untuk menyuarakan keadilan, mendukung perdamaian, serta memastikan agar rakyat sipil yang hanya menginginkan keamanan dan kehidupan yang layak tidak menjadi korban dari kebijakan militer unilateral.

Promosi pariwisata perlu mengedepankan kekayaan budaya Indonesia sekaligus melibatkan diaspora sebagai duta wisata di kancah global. Ini akan memperkuat branding Indonesia di mata dunia,"

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI

## Aliansi Ojol Curhat di DPR Minta Potongan Tarif 10% Direalisasikan

Jakarta (11/09) — Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi potongan tarif aplikasi atau platform maksimal sebesar 10 persen, dengan demikian pihaknya mendapat 90 persen dari hasil pendapatannya.

Aliansi Ojol ini diterima langsung oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) dan Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Pihaknya mengeluhkan potongan 10 persen untuk aplikasi tak kunjung terealisasi.

"Terkait potongan 10 persen ini masih juga belum direalisasikan," kata juru bicara APOB, Yudy, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Ruang BAM, Nusantara II, DPR.

Yudy mengeluhkan BPJS Ketenagakerjaan yang mesti

dibayarkan sendiri oleh driver. Ia menyinggung terkait potongan dari aplikasi untuk asuransi tambahan sebesar 5 persen, tetapi tak kunjung dirasakan pihaknya.

"Nah, dari situ sebenarnya untuk BPJS Ketenagakerjaan kami bisa dibayarkan. Namun, tidak, Pak. Kami BPJSJK membayar sendiri. Dan itu 5 persen tersebut penggunaannya salah satunya bunyinya di KP 1001 'untuk asuransi tambahan'. Sama, Pak, barang itu gak keliatan juga, asuransi tambahan," ujar

Yudy.

Aher mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi dari pengemudi ojek online. Aher berharap pengemudi ojek online nantinya bisa mendapat penghasilan sebesar 90 persen.

"Bertemu dengan delegasi yang mewakili Aliansi Pengemudi Online Bersatu. Mereka membawa aspirasi supaya potongan aplikasi yang selama ini memberatkan mereka itu dikurangi potongannya menjadi 10 persen saja. Tentu 10 persen ini, sisanya 90 persen untuk para pengemudi ojol ya," ujar Aher.

Aher menilai, jika saat ini ojol dipotong sampai 15 persen, 5 persen dari sana semestinya masih bisa dinegosiasikan. Aher mengatakan aspirasi itu akan dikomunikasikan dengan mitra strategis di DPR.

"Yang kedua tadi jaminan sosial pun diserahkan kepada mereka, 5 persen itu tentu ini masih bisa dinegosiasi dengan baik oleh para aplikasi dan nanti diserahkan di akhir tahun katakanlah dengan penyerahan yang benar, itu juga tentu bisa dinegosiasi nanti ke depannya. Tapi yang jelas yang paling pokok 15 persen jadi 10 persen. Itu yang paling pokok," imbuhnya.



"Bertemu dengan delegasi yang mewakili Aliansi Pengemudi Online Bersatu. Mereka membawa aspirasi supaya potongan aplikasi yang selama ini memberatkan mereka itu dikurangi potongannya menjadi 10 persen saja. Tentu 10 persen ini, sisanya 90 persen untuk para pengemudi ojol ya,"

**Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

*Kreatif Atraktif Substantif*



**PKS**

# SUKSESAN **MUNAS VI**

**KOKOH BERSAMA  
MAJUKAN INDONESIA**

**28 - 29 SEPTEMBER 2025**





## Sosialisasi Empat Pilar di Makassar, Meity Ingatkan Pentingnya Persatuan

Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiyah Uluputty, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Kementerian Transmigrasi, dan BMKG.

Pesan ini ia tekankan di tengah suasana duka yang masih menyelimuti Makassar pasca peristiwa unjuk rasa yang memakan korban jiwa sepekan lalu.

Ia menilai, peristiwa tragis yang terjadi di Makassar menjadi di pembelajaran agar tidak terjadi lagi.

"Korbannya adalah saudara-saudara kita juga," imbuhnya.

Meity memandang Indonesia sebagai negara demokratis tentu saja menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan, kebebasan tersebut diselenggarakan secara

seimbang dan bertanggung-jawab. Termasuk dalam penyampaian aspirasi di muka umum.

"Dalam UUD 1945 dan Pancasila terkandung bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Artinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan agama, mengedepankan cinta, kasih sayang, musyawarah dan kedamaian."

"Sebab itu saya mengajak saudara-saudaraku di Sulsel. Ayo kita bersatu. Kita sampaikan aspirasi dengan damai, tertib dan aman. Kita saling memanusiasikan satu dengan yang lainnya sebagaimana diajarkan oleh budaya orang

Sulsel" terangnya.

Meity juga mengingatkan pentingnya persatuan karena Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Terutama oleh negara-negara maju yang saat ini saling memperebutkan pengaruh.

"Wajar, karena kita sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Karena itu kita semua harus cerdas melihat situasi global ini. Kita harus bersatu agar tidak mudah diadu domba sebagai sesama anak bangsa," jelasnya di depan peserta Sosper yang sebagian besar merupakan warga Makassar.

Sosialisasi Empat Pilar ini merupakan yang ke sekian digelar oleh politisi yang dikenal mudah bergaul dengan masyarakat dari berbagai lapisan tersebut. Setiap kegiatan berlangsung lancar dan dihadiri warga secara antusias. Kegiatan ini selalu pula menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.



"Wajar, karena kita sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Karena itu kita semua harus cerdas melihat situasi global ini. Kita harus bersatu agar tidak mudah diadu domba sebagai sesama anak bangsa,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,  
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sulawesi Selatan I



image istimewa

## Nevi Zuairina Dorong Relokasi Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Payakumbuh

Payakumbuh (16/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengunjungi Posko Tanggap Bencana Kebakaran Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh pada Jum'at siang.

Kehadiran ini sebagai bentuk kepedulian langsung kepada para pedagang sekaligus mendukung langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi pasca musibah.

Dalam keterangannya,

“Mudah-mudahan relokasi segera terealisasi, pedagang bisa kembali berdagang seperti semula, dan pembangunan kembali pasar Payakumbuh dapat berlangsung lancar. Amin,

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Anggota Komisi VI DPR ini menyampaikan duka dan empati kepada seluruh pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran. Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah relokasi pedagang ke lokasi sementara agar roda ekonomi tetap berjalan.

“Relokasi menjadi prioritas agar para pedagang tetap bisa berjualan dan tidak kehilangan penghasilan, sembari menunggu pembangunan pasar yang baru,” ungkapnya.

Nevi menegaskan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah dan pusat agar proses relokasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan lokasi sementara akan sangat menentukan keberlangsungan usaha para pedagang.

“Insya Allah, setelah relokasi berjalan lancar, barulah

pembangunan kembali pasar bisa dipercepat,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Anggota Komisi VI DPR ini menyerahkan bantuan pribadi senilai Rp25 juta untuk para pedagang terdampak. Ia juga menginisiasi kolaborasi dengan mitra strategis, di antaranya Bank BNI yang menyalurkan 500 paket sembako senilai Rp63 juta bersama Relawan Indonesia. Selain itu, bantuan dari Pertamina juga tengah diproses untuk memenuhi kebutuhan pedagang.

Nevi mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan mendoakan agar pemulihan berjalan baik.

“Mudah-mudahan relokasi segera terealisasi, pedagang bisa kembali berdagang seperti semula, dan pembangunan kembali pasar Payakumbuh dapat berlangsung lancar. Amin,” pungkas Nevi Zuairina.



## Saadiah Uluputty Salurkan Bantuan Pekarangan Pangan Bergizi Dari Kecamatan untuk Petani di Maluku Tengah

Maluku Tengah (13/09) – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, ST, kembali menyalurkan aspirasinya melalui program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).

Sebanyak 30 paket P2B diberikan kepada kelompok tani di Maluku Tengah sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan keluarga.

Bantuan ini tersebar di delapan kecamatan, yakni Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat,

Kota Masohi, Amahai, Seram Utara Barat, Tehoru, dan Telutih. Masing-masing kelompok tani menerima pupuk NPK, obat tanaman, bibit sayuran, cabai, serta aneka bibit hortikultura.

Menurut Politisi PKS ini, program P2B memiliki peran penting untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga dan produktivitas pertanian masyarakat. Ia menegaskan pekarangan warga seharusnya tidak dibiarkan kosong, melainkan dimanfaatkan menjadi sumber pangan sehat dan bergizi.

Khusus di Kecamatan Kota Masohi, paket P2B diserahkan kepada kelompok tani yang dikelola anak-anak muda. Saadiah menilai keterlibatan generasi muda memberi energi baru untuk mengembangkan potensi pertanian dalam kota.

Para petani penerima bantuan menyambut baik program ini dan merasa sangat terbantu. Mereka menyebut selain ketersediaan bibit dan

pupuk, akses transportasi sering kali menjadi kendala besar bagi petani di wilayah yang jauh dari kota.

Melalui penyaluran ini, Saadiah yang kini duduk di Komisi V DPR yang sebelumnya di Komisi IV menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program-program kerakyatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Saya berharap P2B dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan," tutup Saadiah Uluputty.

“Saya berharap P2B dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

# Kawal RUU Daerah Istimewa Riau, Hendry Munief Sambut Wacana Pembentukan Timsus di Senayan

Jakarta (13/09) — Dukungan terhadap pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) semakin menguat. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Riau secara resmi menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut, Kamis (11/9/2025).

Deklarasi dukungan berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, saat para senator dan anggota DPR RI menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Hadir saat itu dua anggota DPR RI, Hendry Munief dan Sahidin. Dan empat anggota DPD RI asal Riau, yakni Abdul Hamid, Sewitri, KH. Mursyid, dan Arif, kompak menyatakan dukungan.

Anggota DPR RI, Hendry Munief, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses legislasi terkait pembentukan DIR. Ia bahkan menyambut wacana pembentukan timsus khusus (timsus) yang akan melibatkan anggota DPR dan DPD RI.

“Kita siap mengawal proses legislasi dari rancangan undang-undang (RUU) Daerah Istimewa menjadi undang-undang. Potensi Riau sangat besar, sehingga layak untuk

diperjuangkan. Timsus ini penting untuk mengawal RUU ini terealisasi dan menjadi undang-undang.” ujar Hendry Munief.

Lebih lanjut, Hendry Munief menekankan perlunya konsolidasi dan kekompakan seluruh pihak dalam memperjuangkan DIR. Ia juga menyinggung kontribusi besar Riau dalam sejarah perjuangan bangsa.

“Kalau dulu kita tahu ketika proklamasi, Bung Karno menerima sumbangan pesawat dari Aceh dan enam setengah juta golden dari Yogyakarta yang kemudian diberi status daerah istimewa. Maka Riau, yang saat itu menyumbang sekitar dua belas juta golden, seharusnya juga layak menjadi daerah istimewa. Apalagi kontribusi kita kepada negara tidak hanya satu atau dua poin, melainkan lebih dari enam pertimbangan kuat,” jelasnya.

Hendry Munief juga menegaskan pentingnya dukungan lintas fraksi dan lintas daerah, “Kalau kita tidak kompak memang sulit, tapi kalau kita bersatu insyaallah akan mudah. Saya juga akan mengajak kawan-kawan PKS dari berbagai provinsi untuk memberikan dukungan. Perjuangan ini sangat layak diterima karena Riau memiliki sumber daya alam yang luar biasa,” pungkasnya.



“Kalau dulu kita tahu ketika proklamasi, Bung Karno menerima sumbangan pesawat dari Aceh dan enam setengah juta golden dari Yogyakarta yang kemudian diberi status daerah istimewa. Maka Riau, yang saat itu menyumbang sekitar dua belas juta golden, seharusnya juga layak menjadi daerah istimewa. Apalagi kontribusi kita kepada negara tidak hanya satu atau dua poin, melainkan lebih dari enam pertimbangan kuat,”

**H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I

# Habib Idrus Salim Aljufri Gelar Sarasehan, Tekankan Pentingnya Menjaga Jatidiri Bangsa dan Persatuan

Tangerang (15/09) — Anggota MPR RI Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., menggelar sarasehan bersama masyarakat pada Ahad, 14 September 2025 di Grand El Hajj, Asrama Haji Banten, Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan.

Acara dimulai pukul 07.30 WIB dengan registrasi peserta, kemudian dibuka resmi pada pukul 08.00 WIB. Seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKS, yang menambah khidmat suasana sarasehan.

Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Mustofa Ali Ahsan, S.T., M.M., memberikan sambutan pembuka sekaligus mengapresiasi kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan ini.

Memasuki sesi utama, Habib Idrus Salim Aljufri menyampaikan sambutan sekaligus berdiskusi dengan peserta. Ia menegaskan bahwa bangsa

Indonesia tidak boleh kehilangan jatidiri dan harus terus berpegang pada nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa.

“Kalau generasi muda kehilangan jatidiri, maka bangsa ini akan rapuh dan mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi,” ungkap Habib Idrus.

Ia menambahkan bahwa persatuan dan ukhuwah — baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah — menjadi kunci menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kembali cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Lebih jauh, Habib Idrus menekankan pentingnya implementasi Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, empat pilar tersebut bukan hanya untuk dipahami dalam wacana, melainkan dijalankan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyoroti kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dinilai masih penuh tantangan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju dengan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika kepemimpinan nasional dijalankan dengan amanah, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kepentingan sempit.

“Potensi Indonesia luar biasa. Tapi ekonomi kita hanya bisa kuat jika para pemimpin sadar cara menjalankan negara dengan benar, dengan berpihak yang jelas kepada rakyat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Habib Idrus mengapresiasi lang-



“Potensi Indonesia luar biasa. Tapi ekonomi kita hanya bisa kuat jika para pemimpin sadar cara menjalankan negara dengan benar, dengan keberpihakan yang jelas kepada rakyat,”

**HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

kah Presiden yang berkomitmen memperbaiki bangsa, namun ia menekankan bahwa pergantian menteri haruslah untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik.

Rangkaian sarasehan berlangsung hingga pukul 12.00

WIB dengan antusiasme peserta yang tetap terjaga. Sesuai sarasehan, acara dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang menambah kekhidmatan serta memperkuat nilai spiritual dalam kebersamaan tersebut.

# Hadiri Musda PKS Dapil Jateng IX, Fikri Faqih Tekankan Perkuat Kepengurusan dan Fokus Pelayanan Masyarakat

Tegal (12/09) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX, yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes, pada Minggu (8/9/2025).

Acara yang berlangsung di Hotel Khas Kota Tegal ini menjadi momentum penting bagi PKS untuk memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat dengan meresmikan kepengurusan baru yang didominasi oleh kader-kader muda.

Anggota Dewan Syariah PKS, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., hadir dan memberikan pesan kunci kepada para pengurus baru. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, komitmen melayani masyarakat, serta sinergi dengan berbagai pihak untuk memajukan daerah.

“PKS harus terus profesional, komitmen melayani masyarakat, dan bersinergi membangun kota dan kabupaten ber-

sama unsur lainnya,” ujar Fikri.

Dalam sambutannya, pria yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mengapresiasi kinerja kepengurusan sebelumnya yang dinilai sukses dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi pada Pemilu 2024. Di Kabupaten Tegal, PKS berhasil melipatgandakan kursi DPRD dari dua menjadi empat.

Sementara itu, di Kota Tegal, kursi DPRD naik dari empat menjadi lima, dan di Kabupaten Brebes, PKS berhasil mempertahankan empat kursi dengan kenaikan suara yang signifikan.

Peningkatan ini menunjukkan konsolidasi partai yang semakin solid di tingkat lokal. Menurut Fikri, keberhasilan ini ada-

lah modal penting bagi kepengurusan yang baru untuk melanjutkan estafet perjuangan.

Fikri Faqih juga menyoroti pentingnya penguatan struktur partai hingga ke tingkat ranting dan anak ranting. Hal ini sejalan dengan identitas PKS sebagai partai kader.

“PKS hingga kini masih menjadi partai kader sehingga DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) harus fokus pada peningkatan aktivitas kaderisasi, baik jumlah maupun mutu,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar pengurus baru senantiasa melakukan kreasi dan inovasi dalam kegiatan yang membantu masyarakat menghadapi problematika sosial dan ekonomi.

Selain itu, Fikri juga menekankan komitmen untuk menguatkan ekonomi para kader sebagai bagian dari ketahanan internal partai.

Dengan komposisi kepengurusan baru yang didominasi oleh kader muda, PKS Dapil Jateng IX berharap dapat membawa semangat segar dan



“PKS hingga kini masih menjadi partai kader sehingga DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) harus fokus pada peningkatan aktivitas kaderisasi, baik jumlah maupun mutu,

**Dr. H. ABDUL  
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

inovatif. Fikri Faqih berharap kepengurusan periode 2025-2030 ini mampu menjadikan PKS semakin dicintai oleh

masyarakat di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.



image istimewa

## Hendry Munief Terima Aspirasi PT. Lusaga Traindo, Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas SDM

Jakarta (16/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, MBA, menerima aspirasi dari PT. Lusaga Traindo dalam rangkaian Hari Aspirasi PKS.

Perwakilan PT. Lusaga Traindo menyampaikan tujuan audiensi ini sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi. Pihaknya menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama di

“Karena itu kami melihat PT. Lusaga Traindo memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan attitude dan manner manusia,”

**H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.**

Anggota Komisi VII DPR RI

sektor pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehormatan diterima langsung oleh Hendry Munief.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hendry Munief menyampaikan bahwa dalam Hari Aspirasi PKS, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Ia menegaskan bahwa manusia seharusnya dipandang sebagai modal (capital), bukan sekadar sumber daya (resource).

“Istilah yang tepat bukan lagi Human Resource Development, melainkan Human Development,” ujarnya.

Hendry juga menginformasikan akan adanya beberapa acara bersama dengan beberapa lembaga dalam waktu dekat, dan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama

dengan PT. Lusaga Traindo.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembinaan sikap dan manner bagi pejabat publik agar terhindar dari kegaduhan akibat kesalahan berucap.

“Karena itu kami melihat PT. Lusaga Traindo memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan attitude dan manner manusia,” ungkapnya.

Dalam penutupannya, Hendry Munief mengungkapkan pandangan tentang kondisi bangsa saat ini. Meskipun Negara ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi tetap ada keyakinan bahwa terdapat potensi yang ada masih sangat besar. Seperti pohon kecil yang harus dirawat agar kelak menjadi pohon besar, ia mengingatkan bahwa bangsa ini perlu memperkuat akar dan jaringan untuk bisa tumbuh kokoh.



image istimewa

## Dorong Ekonomi Daerah, PKS Dukungan Pengembangan MBG Unggas di Pringsewu

Jakarta (17/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Model Bisnis Gabungan (MBG) di Kabupaten Pringsewu, Lampung, sebagai upaya memperkuat rantai pasok dan meningkatkan nilai ekonomi sektor peternakan unggas di daerah.

Dalam Agenda Aspirasi yang digelar di Ruang Pleno, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu (17/09), Kharis menekankan pentingnya kehadiran Rumah Potong Unggas (RPU) sebagai salah satu elemen utama dalam rantai pasok MBG. Menurutnya, keberadaan RPU akan memberikan kepastian pasar

bagi para peternak lokal.

“Kalau ada teman pengusaha mau bikin RPU, ini bisa jadi solusi pasok unggas di Pringsewu. Kapasitas satu RPU itu bisa mencapai 500 ekor per hari, sementara kebutuhan pasar bisa sampai ratusan ribu ekor. Artinya, ada potensi besar yang bisa digarap,” ujar Kharis.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya sistem MBG yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, para peternak tidak hanya mengandalkan penjualan daging ayam mentah, tetapi juga bisa memanfaatkan hasil sampingan yang bernilai ekonomi.

“Selama ini banyak pedagang hanya mengandalkan untung dari jeroan atau ceker, bukan dari dagingnya. Kalau ada RPU dalam skema MBG, peternak bisa bersaing karena ada jaminan pasar dan harga

yang lebih stabil,” jelasnya.

Meski demikian, Kharis mengakui bahwa dukungan pemerintah masih terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan daerah untuk mendorong investasi dan mempermudah perizinan lahan maupun infrastruktur pendukung.

“Kalau bantuan dari pemerintah belum ada, setidaknya kita bisa dorong agar ada kemudahan akses lahan dan perizinan bagi pengusaha yang serius mengembangkan RPU di Pringsewu,” tegasnya.

Kharis berharap, dengan adanya dukungan dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan MBG di Pringsewu dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

“Kalau ada teman pengusaha mau bikin RPU, ini bisa jadi solusi pasok unggas di Pringsewu. Kapasitas satu RPU itu bisa mencapai 500 ekor per hari, sementara kebutuhan pasar bisa sampai ratusan ribu ekor. Artinya, ada potensi besar yang bisa digarap,”

**Dr. H. ABDUL KHARIS  
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



# Saadiah Uluputty Dorong Demokrasi Bermakna dalam FGD Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila di Surabaya

Surabaya (16/09) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Legislasi DPR RI di UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Acara ini mengangkat tema penting: *"Memperkuat Demokrasi melalui Meaningful Participation: Perencanaan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila."*

Dalam kesempatan tersebut, Saadiah yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas prosedural. Menurutnya, demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang hidup dalam ruang partisipasi bermakna, di

mana rakyat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktif menyumbangkan gagasan, mengawasi kebijakan, serta memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa.

"Partisipasi rakyat harus kritis, cerdas, dan konstruktif. Inilah fondasi agar demokrasi kita kokoh. Regulasi yang sedang dibahas, termasuk RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk

berperan serta," ujar Saadiah.

Diskusi yang berlangsung di ruang amphitheater UIN Sunan Ampel itu dihadiri mahasiswa, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat. Politisi PKS ini menilai, forum seperti ini menjadi wadah berharga untuk mendengarkan suara generasi muda dan kalangan intelektual secara langsung. Ia menambahkan, keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi merupakan wujud nyata dari demokrasi yang sehat.

Wakil rakyat Maluku ini juga mengungkapkan kekagumannya pada semangat para peserta FGD. Ia melihat wajah-wajah optimis dari mahasiswa dan akademisi yang ingin Indonesia lebih maju dan berdaulat. Menurutnya, energi positif dari generasi muda ini adalah modal besar untuk menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan.

"Dari perjalanan panjang hari ini, saya semakin yakin bahwa masa depan demokrasi ada di tangan generasi muda yang berani bersuara, berpikir kritis, dan setia menjaga nilai kebangsaan," tegasnya.

"Saya berharap, agar ikhtiar bersama melalui forum-forum partisipatif seperti FGD ini menjadi bagian dari langkah besar dalam membangun bangsa, memperkuat demokrasi, serta memastikan Pancasila tetap hidup dalam denyut kehidupan rakyat Indonesia," tutup Saadiah Uluputty.



"Partisipasi rakyat harus kritis, cerdas, dan konstruktif. Inilah fondasi agar demokrasi kita kokoh. Regulasi yang sedang dibahas, termasuk RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta,"

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

## Tifatul Sembiring: Reformasi Harus Selamatkan Negara Hukum, Bahas Ulang Ambang Batas Pemilu

Jakarta (17/09) — Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan pentingnya menjaga semangat reformasi agar tujuan menghadirkan negara hukum yang berkeadilan tetap terwujud.

Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Sekolah Konstitusi Fraksi PKS, bertema “Putusan MK No. 135/2024, Implikasi bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik”, yang berlangsung di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks MPR RI, Jakarta, Selasa (17/9).

“Reformasi itu adalah untuk menghadirkan negara hukum. Dan negara hukum itu tentu bukan hukum yang asal ada, tapi hukum yang benar-benar ditegakkan,” ujar Tifatul.

Mantan Menkominfo itu juga menyinggung soal ambang batas (threshold) yang menurutnya harus dikaji secara hati-hati. Ia mengingatkan bahwa aturan ini berpengaruh

langsung pada representasi rakyat di parlemen.

“Belum tentu threshold 0% itu tepat, tapi juga tidak otomatis threshold tinggi adalah solusi. Perlu ada koreksi dan pembahasan yang jernih, supaya tidak mengurangi makna representasi rakyat,” sambungnya.

Lebih lanjut, legislator PKS tersebut menekankan pentingnya menjadikan momentum pembaharuan aturan pemilu sebagai kesempatan memperbaiki sistem politik di Indonesia.

“Mumpung ada momentum berbenah, kita harus hadir dengan sikap positif yang menghadirkan kualitas demokrasi dan kualitas diri bangsa,” tutup Tifatul.

“Belum tentu threshold 0% itu tepat, tapi juga tidak otomatis threshold tinggi adalah solusi. Perlu ada koreksi dan pembahasan yang jernih, supaya tidak mengurangi makna representasi rakyat,”

**Ir. H. TIFATUL SEMBIRING**

Ketua Fraksi PKS MPR RI



image istimewa

## Hidayat Nur Wahid Soroti Putusan MK: Perlu Jawaban atas Dampak Demokrasi dan Anggaran Pemilu

Jakarta (17/09) — Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II, Hidayat Nur Wahid (HNW), menekankan pentingnya mengkaji secara serius

implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/2024 terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada

“Yang terakhir sebenarnya MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai negatif legislator. Apakah dia sudah menjadi positif legislator yang merupakan kewenangan dari DPR, DPD, dan pemerintah,”

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Sekolah Konstitusi Fraksi PKS dengan MPR RI, bertema “Putusan MK No. 135/2024, Implikasi bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik”, yang berlangsung di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks MPR RI, Jakarta, Selasa (17/9).

“Bisa memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, itu yang perlu terjawab. Baik di institusi tingkat lokal, katanya akan memperbaiki di tingkat lokal. Yang kedua, apakah keputusan MK No. 135/2024 ini bertentangan dengan Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia, dimana MK dianggap nol batas kewenangan, prinsip kebersamaan,” ujar HNW.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini menyoroti dampak putusan terhadap anggaran negara, khususnya pembiayaan pemilu yang berpotensi meningkat, serta posisi MK dalam relasi kewenangan lembaga negara.

“Yang terakhir sebenarnya MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai negatif legislator. Apakah dia sudah menjadi positif legislator yang merupakan kewenangan dari DPR, DPD, dan pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengaitkan Putusan No. 135/2024 dengan sejumlah putusan MK sebelumnya yang ramai diperbincangkan publik, di antaranya putusan No. 2/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta putusan No. 60/2004 yang mengubah syarat pengajuan calon kepala daerah dari 20 persen menjadi 7,5 persen.

“Putusan-putusan seperti itu kan menimbulkan tanda tanya. Maka perlu dikaji apakah memang sesuai dengan semangat konstitusi, atau justru sebaliknya,” tegas legislator PKS tersebut.



Website  
**fraksi.pks.id**



Instagram  
**fraksipksdprri**



Youtube  
**PKSTV DPR RI**



Facebook  
**Fraksi PKS DPR RI**



X (Twitter) | @FPKSDPRRI  
**Fraksi PKS DPR RI**



Tiktok  
**Fraksi PKS DPR RI**



Telegram  
**Fraksi PKS DPR RI**



Whatsapp  
**Fraksi PKS DPR RI**

**Nantikan  
Setiap Pekan**